



Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi
Biro Perencanaan dan Organisasi
Sekretariat Jenderal DPR RI

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

TRIWULAN 1

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2025



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan I Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, sekaligus menjadi instrumen penting untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan agenda reformasi yang telah ditetapkan.

Laporan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Reformasi Birokrasi selama Triwulan I Tahun 2025, yang mencakup aspek-aspek tata kelola pemerintahan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan. Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan proses yang dinamis dan membutuhkan komitmen kuat dari seluruh unit kerja. Oleh karena itu, hasil monitoring dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempercepat pelaksanaan reformasi, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan rekomendasi strategis yang dapat mendukung tercapainya target Reformasi Birokrasi yang lebih optimal ke depan.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam mendukung pengambilan kebijakan dan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, Maret 2025
Ketua Tim Reformasi Birokrasi 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rahmad".

Rahmad Budiaji, S.I.P., M.Si

A. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan agenda nasional yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani. Sebagai *supporting system* dari lembaga legislatif, Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR) memiliki peran strategis dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang merupakan tugas pokok dan fungsi Lembaga DPR RI. Untuk itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR menjadi langkah penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang profesional, *agile*, efektif, dan akuntabel.

Dalam rangka mendorong capaian Reformasi Birokrasi secara terukur dan berkelanjutan, diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaannya. Monitoring dan evaluasi tidak hanya menjadi alat untuk menilai progres, tetapi juga sebagai dasar perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program kerja yang mendukung Indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi. Maka, pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja sekaligus mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses implementasi program-program Reformasi Birokrasi. Selain itu, monitoring dan evaluasi ini juga menjadi instrumen pengawasan internal yang penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga awal tahun 2025 ini, *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional terbaru belum secara resmi diterbitkan oleh Kementerian PANRB. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan arah strategis dan acuan teknis bagi instansi pemerintah, termasuk Setjen DPR, dalam merumuskan agenda Reformasi Birokrasi. Meskipun begitu, upaya perbaikan birokrasi tetap dilaksanakan secara adaptif dan kontekstual sesuai dengan karakteristik kelembagaan Setjen DPR yang memiliki peran sebagai *supporting system* bagi DPR.

Oleh karena itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Triwulan I Tahun 2025 menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai mekanisme kontrol internal, tetapi juga sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab terhadap kesinambungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Setjen DPR. Melalui laporan ini, diharapkan tersedia data dan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan agenda reformasi, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut. Laporan ini juga menjadi bagian dari upaya dokumentasi dan akuntabilitas atas langkah-langkah strategis dalam mendukung transformasi birokrasi.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi* Tahun 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024*;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1178 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1124/SEKJEN/2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI 2020 – 2024*.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB Triwulan I Setjen DPR adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan hasil pencapaian RB Setjen DPR;
2. Memonitor pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2025 pada setiap indikator kegiatan utama RB di Setjen DPR;
3. Memberikan saran perbaikan dan penyempurnaan untuk meningkatkan pencapaian RB Setjen DPR;
4. Menentukan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan RB di Setjen DPR guna meningkatkan hasil pencapaian RB Setjen DPR.

LAPORAN PELAKSANAAN RB GENERAL TRIWULAN I TAHUN 2025
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Reformasi Birokrasi (RB) General difokuskan pada penyelesaian persoalan mendasar, khususnya perbaikan sistem dan tata kelola internal di lingkungan instansi pemerintah. Pelaksanaan RB General dimaksudkan agar pencapaian target strategis Reformasi Birokrasi dapat lebih terarah dan dipercepat secara menyeluruh, sejalan dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam *Road Map RB 2020–2024*. Pada level instansi atau mikro, pelaksanaan RB mencakup penerapan kebijakan dan program RB yang telah dirumuskan pada tingkat makro dan meso, serta pelaksanaan inovasi RB yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang penajaman *Road Map RB Nasional*, penilaian RB kini mencakup dua komponen utama: RB General dan RB Tematik. RB General dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Kegiatan Utama dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kegiatan Utama, sedangkan RB Tematik difokuskan pada lima tema utama yang mendukung sasaran Pembangunan Nasional. Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Setjen DPR beserta capaiannya pada Triwulan I Tahun 2025.

A. PROGRES CAPAIAN RENCANA AKSI RB GENERAL DAN INDIKATOR RB GENERAL TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Penyederhanaan Birokrasi: Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	26,98	26,98	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyampaian Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	Surat Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Jawaban atas Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	Penyusunan Kajian Penyederhanaan Birokrasi	-	-	1	-	Rp. 84.562.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Usulan Penyederhanaan Birokrasi	Surat Usulan Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penetapan Struktur Organisasi berdasarkan Surat Persetujuan Penataan Organisasi	Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV
Penyusunan Laporan Penyederhanaan Birokrasi	Laporan Penyederhanaan Birokrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penyampaian Usulan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Birokrasi Organisasi untuk Penyederhanaan Birokrasi telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Urgensi usulan izin prinsip keleluasaan terbatas penyederhanaan organisasi untuk penyederhanaan birokrasi didasarkan pada kekhususan karakteristik Setjen DPR yang mendukung DPR sebagai Lembaga legislatif. Dalam melaksanakan dukungan tersebut, Setjen DPR memiliki lingkup tugas yang bersentuhan langsung dengan DPR dan pekerjaannya bersifat koordinatif sehingga masih diperlukan hierarki pengambilan Keputusan dari jabatan pimpinan tinggi hingga jabatan pengawas.

Proses usulan dimulai dengan menyusun kajian yang memuat latar belakang, dasar hukum, dan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang ditentukan, yaitu terdapat kendala terkait penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada aspek penyederhanaan birokrasi, terdapat urgensi untuk diberikan keleluasaan terbatas dalam mekanisme penghitungan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi. Keleluasaan terbatas yang diusulkan adalah dengan mengeluarkan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Persidangan dari kewajiban dan penghitungan penyederhanaan struktur organisasi. Melalui langkah ini, nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya untuk indikator penyederhanaan struktur organisasi akan lebih mencerminkan keadaan sebenarnya, sesuai dengan karakteristik DPR

sebagai lembaga legislatif. Selanjutnya, usulan yang dilengkapi kajian disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Menteri PANRB melalui Surat Nomor: B/15/OT.01/1/2025 tanggal 2 Januari 2025, hal: Permohonan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Struktur Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Selanjutnya, rencana aksi evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi juga telah terlaksana. Evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui beberapa rangkaian kegiatan, yaitu rapat koordinasi, pengisian kuesioner, dan wawancara atas jawaban kuesioner. Responden dalam kegiatan evaluasi dipilih berdasarkan perwakilan dari Kementerian Pusat, Sekretariat Lembaga Negara, dan Instansi Daerah. Setjen DPR dipilih sebagai salah satu responden dalam kegiatan evaluasi dimaksud sebagai perwakilan dari Sekretariat Lembaga Negara.

Rapat koordinasi evaluasi kebijakan penyederhanaan birokrasi dilakukan pada tanggal 21 Januari 2025 berdasarkan undangan Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana melalui Surat Nomor: B/4/KT.02/2025 tanggal 14 Januari 2025, hal: Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi Surat Permohonan Izin Prinsip Keleluasaan Terbatas Penyederhanaan Struktur Organisasi Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Setelah rapat koordinasi, Setjen DPR menyiapkan kuesioner yang disampaikan kepada unit kerja yang telah dilakukan penyederhanaan birokrasi di Setjen DPR, yaitu Biro SDMA, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, dan Bagian Administrasi Keuangan. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup dimensi pengambilan keputusan, dimensi pelayanan, dimensi efisiensi biaya, dimensi tantangan kebijakan, dan tindak lanjut.

Kuesioner yang telah diisi oleh unit kerja yang telah dilakukan penyederhanaan kemudian disintesikan menjadi satu jawaban yang komprehensif dan disampaikan kepada Kementerian PANRB. Jawaban kuesioner Setjen DPR kemudian diklarifikasi melalui wawancara yang dilakukan sesuai Surat Undangan Nomor: B/30/KT.02/2025 tanggal 19 Februari 2025, hal: Pelaksanaan Wawancara Dalam Rangka Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan pengisian kuesioner dan wawancara, kebijakan penyederhanaan birokrasi di Setjen DPR membawa beberapa perbaikan, terutama dalam hal pemanfaatan teknologi. Namun, tantangan seperti ketidaksiapan SDM, kompleksitas prosedur, dan kurangnya koordinasi masih menjadi kendala utama. Selain itu, terjadi penambahan beban kerja yang signifikan terhadap Pejabat Administrator yang menjadi sentral pengambilan keputusan setelah dihilangkannya Pejabat Pengawas pasca penyederhanaan birokrasi Setjen DPR.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/nTYjstCr5PpiKiD>

2. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4	4	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2194/SEKJEN/2023 tentang Sistem dan Mekanisme Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI	Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI	-	1	-	-	Rp. 61.760.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Integrasi Implementasi Sistem Kerja Baru ke dalam Sistem Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI	Tangkapan layar Aplikasi Hasil Integrasi	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Sosialisasi Sistem Kerja Baru	Laporan Sosialisasi Sistem Kerja Baru	-	-	1	-	Rp. 32.200.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	Laporan Monitoring dan Evaluasi Sistem Kerja Baru	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV
Penyusunan Laporan Sistem Kerja Baru	Laporan Sistem Kerja Baru	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan akan dimulai pada Triwulan II. Oleh karena itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan I.

3. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional:

a. Indeks SPBE

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4,23	4,23	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN	Peta Proses Bisnis berbasis BPMN	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Penerapan Manajemen Perubahan pada Layanan TIK	Laporan Pengembangan aplikasi penerapan manajemen perubahan Layanan TIK	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	Laporan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN (*Business Process Model and Notation*) telah terlaksana melalui kegiatan rapat penyusunan Rencana Kerja SPBE pada tanggal 19 Februari 2025 di Artotel Mangkuluhur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah strategis dalam penyusunan Arsitektur Domain Proses Bisnis berbasis BPMN, yang menjadi bagian penting dalam pemenuhan indikator SPBE, khususnya pada indikator 14. Rapat ini dihadiri oleh berbagai unit kerja terkait serta menghadirkan narasumber eksternal, Ahmad Baehaqi, S.Si., M.T., selaku asesor SPBE tahun 2024 dari Universitas Padjajaran.

Dalam rapat tersebut, narasumber menekankan pentingnya transformasi proses bisnis dari bentuk naratif atau konvensional menjadi format BPMN yang lebih terstruktur dan dapat diukur. Disampaikan bahwa perubahan ini mengandung potensi sebagai *radical change*, yang memerlukan pendekatan manajemen perubahan secara sistematis, terutama dalam masa transisi yang akan mengakomodasi dua jenis proses bisnis secara paralel. Salah satu rekomendasi dari narasumber adalah memprioritaskan konversi proses-proses bisnis strategis yang belum tercantum dalam Peta Proses Bisnis RITIK menjadi diagram BPMN, serta melakukan sosialisasi aktif kepada unit kerja pengguna agar memahami arsitektur baru ini sebagai upaya peningkatan efisiensi dan integrasi layanan digital. Sebagai langkah selanjutnya, akan dilakukan koordinasi dan perencanaan penyusunan arsitektur domain

proses bisnis berbasis BPMN secara lebih terarah bersama Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) sebagai unit yang berwenang dalam penataan proses bisnis di Setjen DPR.



Gambar 1.1 Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE

Selanjutnya, pada rencana aksi penerapan manajemen perubahan pada layanan TIK telah terlaksana melalui penetapan aplikasi STELA (Sistem Tiket dan Eskalasi Layanan) sebagai media utama dalam pengelolaan proses perubahan layanan. Hal ini sejalan dengan dibentuknya Tim Pengelola Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 58/SEKJEN/2025, yang mendukung implementasi ISO/IEC 20000 dan memastikan setiap perubahan layanan tercatat, dikelola, dan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang terstandarisasi.

Pada Februari 2025, salah satu penerapan nyata manajemen perubahan adalah pengembangan fitur rating pada aplikasi STELA. Pengembangan ini diawali dengan permohonan perubahan resmi (Form No. RF/2025/02/01) oleh Tim Bidang Tata Kelola TI, yang mengidentifikasi rendahnya tingkat partisipasi pengguna dalam memberikan *feedback* terhadap layanan TIK. Sebelumnya, mekanisme penilaian yang mengharuskan pengguna login dan memasukkan nomor tiket secara manual terbukti menyulitkan dan menghambat evaluasi kualitas layanan.

Perubahan yang diusulkan mencakup otomatisasi pengiriman tautan rating melalui pesan WhatsApp setelah tiket dinyatakan selesai. Inovasi ini memungkinkan pengguna memberikan penilaian secara langsung tanpa hambatan teknis, dengan indikator penilaian yang lebih spesifik seperti kecepatan, ketepatan, dan keramahan petugas. Berdasarkan Laporan Pengembangan STELA – Fitur Rating (Maret 2025), hasil uji coba menunjukkan peningkatan keterlibatan pengguna dan efektivitas sistem baru, serta tingkat keberhasilan pengiriman notifikasi mencapai 98%.

Dengan integrasi fitur ini, aplikasi STELA kini tidak hanya berperan dalam pencatatan dan penyelesaian tiket, tetapi juga sebagai alat pengumpulan umpan balik strategis yang memperkuat siklus manajemen perubahan. Evaluasi awal yang positif menunjukkan bahwa perubahan ini merupakan langkah signifikan dalam mendukung penerapan manajemen layanan TIK yang lebih adaptif dan berorientasi pada pengguna.

Kemudian pada rencana aksi pelaksanaan Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal, Pusat Teknologi Informasi telah melaksanakan rapat penyusunan Rencana Kerja SPBE pada 19 Februari 2025. Dalam rapat tersebut, narasumber eksternal Ahmad Baehaqi, S.Si., M.T. memberikan rekomendasi penting terkait perlunya pelaksanaan audit eksternal sebagai bentuk validasi objektif terhadap tata kelola dan keamanan layanan TIK yang telah berjalan.

Rekomendasi tersebut sejalan dengan hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian PANRB pada tahun 2024, di mana nilai untuk indikator 29 (audit infrastruktur SPBE), indikator 30 (audit aplikasi SPBE), dan indikator 31 (audit keamanan SPBE) masih berada pada level 3. Artinya, penerapan audit sudah dilakukan secara rutin namun belum sepenuhnya terdokumentasi atau belum melibatkan pihak independen dari luar instansi. Untuk itu, Pusat Teknologi Informasi mendorong pelaksanaan audit eksternal yang terencana dan terdokumentasi guna memperkuat pemenuhan indikator serta meningkatkan kredibilitas dan efektivitas audit yang dilakukan.

Narasumber juga menekankan pentingnya peran auditor internal sebagai jembatan ketika auditor eksternal menemukan temuan audit. Dokumentasi hasil audit internal yang terdahulu akan menjadi bukti bahwa instansi telah melakukan pengawasan internal dan perbaikan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan level kematangan SPBE sekaligus memastikan bahwa proses pengelolaan TIK berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko yang kuat.



Gambar 1.2 Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/tZ3i8D98NNGyRjK>

b. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	3	3	Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Arsitektur SPBE dan sosialisasi kepada unit terkait	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027	Laporan Pemutakhiran Arsitektur SPBE To-Be pada SIA SPBE V2	1	1	1	1	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Standar Manajemen Data	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Rencana aksi Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027 telah terlaksana. Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be merupakan langkah krusial dalam memastikan transformasi digital DPR RI berlangsung secara terarah dan terencana. Pada Triwulan I Tahun 2025, kegiatan ini difokuskan pada rencana proses pemutakhiran arsitektur dalam sistem SIA SPBE versi 2, yang didasarkan pada revisi dan validasi dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) Tahun 2025–2027. Proses penyempurnaan ini didukung oleh hasil Rapat Reviu Draft RITIK bersama Kementerian PANRB dan para pakar di bidang teknologi informasi yang dilaksanakan pada 25 Februari 2025.

Dalam forum tersebut, disoroti bahwa dokumen RITIK harus mampu mencerminkan target arsitektur SPBE yang tidak hanya menggambarkan kondisi saat ini, tetapi juga merumuskan bentuk ideal sistem informasi di masa mendatang. Arsitektur SPBE To-Be yang disempurnakan perlu menyelaraskan seluruh inisiatif dan pengembangan aplikasi agar terhindar dari tumpang tindih sistem serta dapat mendukung rasionalisasi dan konsolidasi teknologi. Pendekatan ini menjadi sangat penting mengingat tantangan efisiensi sumber daya dan kebutuhan akan interoperabilitas lintas unit kerja yang semakin tinggi.

Masukan dari para pakar menekankan pentingnya konsistensi antara RITIK dan struktur arsitektur SPBE To-Be yang termuat dalam SIA SPBE. Dengan pemutakhiran ini, diharapkan DPR RI memiliki peta jalan pengembangan teknologi informasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan organisasi dan kebijakan nasional. Progres ini menunjukkan kesiapan awal dalam mendukung penguatan kapabilitas arsitektural, sekaligus menjadi acuan dalam pengambilan keputusan strategis berbasis TI di masa depan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qjf4NQmis488QyG>

4. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Indeks Perencanaan Pembangunan

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025		Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	94,42	94,5		Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Konsistensi Rencana Kerja K/L terhadap Rencana Strategis K/L	Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
	Rencana Kerja DPR RI TA 2025	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Dokumen Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Rencana Kerja K/L	Dokumen Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Penyusunan Rencana Kerja DPR RI merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun oleh setiap Kementerian/Lembaga, termasuk DPR RI, sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk satu tahun anggaran. Penyusunan Rencana Kerja DPR RI TA 2025 telah terlaksana secara tepat waktu dan sistematis. Proses penyusunan dimulai sejak bulan April 2024, ditandai dengan diterbitkannya Surat Bersama Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga TA 2025. Tahapan penyusunan Rencana Kerja ini berlangsung hingga

Desember 2024, yaitu saat diterbitkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DPR RI TA 2025.

Sepanjang periode April hingga Desember, proses penyusunan Rencana Kerja dilakukan secara dinamis, mengikuti alur siklus perencanaan dan penganggaran nasional. Rencana Kerja senantiasa mengalami perbaikan dan penyesuaian sebagai respons terhadap perubahan kebijakan fiskal dan penyesuaian Pagu Indikatif yang terjadi dalam proses penyelarasan dan pembahasan anggaran di tingkat nasional. Penyusunan dilakukan secara partisipatif dan terkoordinasi antar unit kerja dengan mengacu pada dokumen RPJMN, Konsep Rencana Strategis, serta isu strategis nasional. Seluruh tahapan penyusunan berjalan lancar, tanpa hambatan berarti dan menghasilkan dokumen Rencana Kerja DPR RI TA 2025 yang telah disahkan secara formal dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L serta dokumen anggaran lainnya.

Kemudian pada rencana aksi sinkronisasi/penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA K/L TA 2025 juga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tahapan perencanaan nasional. Proses ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian perencanaan program dan kegiatan DPR RI dengan dokumen penganggaran nasional, khususnya indikator Kesesuaian Pagu Anggaran RKA K/L dengan Pagu Anggaran Rencana Kerja K/L. Sinkronisasi dilakukan melalui integrasi dua *platform* utama, yaitu aplikasi KRISNA yang digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja, dan aplikasi SAKTI yang digunakan untuk penyusunan RKA-K/L. Penyelarasan ini dilakukan untuk menjamin bahwa nilai Pagu dalam dokumen Rencana Kerja dan RKA-K/L selaras, baik secara struktural maupun substansial.

Pada tahun berjalan, proses sinkronisasi ini mengalami dinamika karena adanya penyesuaian terhadap struktur organisasi DPR RI, yaitu penambahan tiga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru yaitu Komisi XII, Komisi XIII, dan Badan Aspirasi Masyarakat, yang mulai dianggarkan dan dilaksanakan sejak Januari 2025. Perubahan ini memerlukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan RKA-K/L, termasuk revisi Pagu dan pergeseran program/kegiatan, agar mencerminkan kebutuhan dan struktur organisasi baru.

Menyikapi hal tersebut, Bagian Perencanaan Setjen DPR telah melakukan proses sinkronisasi aktif pada kedua aplikasi KRISNA dan SAKTI guna memastikan bahwa seluruh perubahan dan penyesuaian tersebut tercermin secara konsisten. Langkah ini penting agar Pagu Anggaran pada kedua dokumen (Rencana Kerja dan RKA-K/L) tetap terintegrasi dan tidak menimbulkan deviasi yang dapat mempengaruhi kualitas penilaian IPPN.

Sepanjang proses ini, tidak terdapat kendala teknis maupun substantif yang menghambat pelaksanaan sinkronisasi. Seluruh perubahan telah diakomodasi secara sistematis dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan penyelarasan ini menjadi bukti komitmen Setjen DPR dalam menerapkan tata kelola perencanaan dan penganggaran yang adaptif, terukur, dan selaras dengan kebijakan nasional.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bmekFSSGMdGEq4i>

**5. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi:
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	68,92	80	Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Rencana Strategis DPR RI 2025 - 2029	Dokumen Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025 - 2029 pasca sinkronisasi dengan RPJMN	-	-	1	-	Rp. 47.300.400	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Penjenjangan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021	Dokumen Penjenjangan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2025	Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI prapenetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	26	-	-	-	Rp. 16.415.000	Telah terlaksana
	Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II pasca Penetapan Rencana Strategis DPR RI Tahun 2025-2029	-	-	26	-	Rp. 49.245.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Penyusunan Rencana Aksi dengan penetapan target dan mencantumkan realisasi per triwulan yang	Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	26	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
	Dokumen Rencana Aksi atas perubahan	-	-	-	26	Rp. 0	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
telah dikuantifikasi dan dapat diukur	Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI						dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi yang andal	Dokumen Penetapan Pedoman Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi	-	-	1	-	Rp. 6.699.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
	Laporan Sosialisasi Pengukuran Kinerja Organisasi	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Organisasi yang andal	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
	Laporan Bimbingan Teknis Pengukuran Kinerja Organisasi	1	-	-	-	Rp.100.000.000	Telah terlaksana
Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Perjanjian Kinerja Aksi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan Unit Kerja	1	1	1	1	Rp. 64.200.000	Telah terlaksana
	Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Semester	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV
Penerapan Reward dan Punishment Kinerja Organisasi dan Kinerja Individu	Laporan Pelaksanaan Penerapan Reward dan Punishment Kinerja Organisasi	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV
	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Laporan Sosialisasi Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI dan Biro Perencanaan dan Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	2	-	-	-	Rp. 99.230.000	Telah terlaksana
	Laporan Kinerja Deputi, Kepala Badan, dan Inspektur Utama, serta Eselon II sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014	24	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Evaluasi Internal atas Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Hasil Evaluasi Internal Pelaksanaan AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	21	5	-	Rp. 66.825.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Monitoring Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Internal AKIP Unit Kerja Eselon I dan Eselon II Sekretariat Jenderal DPR RI	-	21	5	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III

Rencana aksi penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Eselon I dan Eselon II Tahun 2025 telah terlaksana dan ditandatangani pada tanggal 8 Januari 2025 bersamaan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Setjen DPR Tahun 2025. Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan arahan dan masukan dengan Pimpinan adalah sebagai berikut:

- Mencantumkan sasaran dan indikator kinerja Satker Dewan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pencantuman ini merupakan konsekuensi dari digabungnya Rencana Strategis DPR RI dan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI ke dalam satu Rencana Strategis sesuai dengan arahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan. Praktik yang berjalan selama ini hanya mencantumkan sasaran, indikator, dan target yang mengacu pada Satker Setjen pada Perjanjian Kinerja;
- Menggunakan formulasi Perjanjian Kinerja seperti yang dipergunakan pada tahun sebelumnya hingga ditetapkannya Rencana Strategis baru pada pertengahan tahun 2025.

Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi melalui Bagian PKORB juga telah menyusun pedoman penilaian kinerja organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI pedoman ini mengganti pedoman sebelumnya yang telah dibuat Bagian PKORB. Sebagaimana diatur pada pedoman yang baru dilakukan secara periodik yang terbagi menjadi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Tahunan dan Triwulanan. Penilaian Kinerja dilakukan berdasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya, baik pada Perjanjian Kinerja untuk target kinerja tahunan maupun pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk target kinerja triwulan.

Metode penilaian tersebut mengadopsi model PKO yang ditetapkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 dimaksud menjadikan variabel komponen Nilai Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Nilai Evaluasi AKIP) sebagai salah satu komponen koreksi pada Nilai Capaian Organisasi (NKO). Komponen ini menjadi salah satu dasar dalam melakukan PKO, sehingga capaian *output* maupun *outcome* tidak hanya diukur berdasarkan ketercapaian target, tetapi juga mempertimbangkan variabel kualitas dalam seluruh proses pencapaiannya.

Kemudian rencana aksi pengembangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Organisasi yang andal juga telah terlaksana pada tanggal 10 – 11 Februari 2025. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan tema Pengukuran Kinerja Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mengundang Bagian Perencanaan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bidang Sistem dan Infrastruktur Teknologi Informasi, Bagian Administrasi Badan Keahlian, Bagian Administrasi Inspektorat Utama, Bagian MKI ASN, dan Bagian TU Pimpinan Setjen DPR dengan narasumber Dr. Aries Zuswana dari lembaga BNSP.

Selanjutnya, rencana aksi penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja telah terlaksana dalam rangka perbaikan proses pelaksanaan Perencanaan, Pengukuran dan Pengumpulan data kinerja untuk kemudian dilakukan perbaikan terhadap Rencana Aksi Perjanjian Kinerja kedepan.

Bersamaan dengan itu, rencana aksi penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 pun telah terlaksana. Laporan Kinerja disusun sebagai komitmen atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri PANRB Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atas penggunaan anggaran untuk setiap pelaksanaan kegiatan.

Laporan kinerja yang telah disusun telah dikirimkan ke Kementerian PANRB dan BAPPENAS sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan juga ke Kementerian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada akhir Februari 2025. Dokumen tersebut juga telah di *upload* di esr.menpan.go.id. Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI, Eselon I dan Eselon II juga telah dipublikasikan ke website.dpr.go.id sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja lembaga kepada publik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/orQWq4ao4i2ssCd>

6. Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas (ZI)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	0 unit	3 unit	Inspektorat I dan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, dan/atau Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target Reformasi Birokrasi sesuai rencana atas indikator ZI	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pembangunan dan Penilaian Mandiri	LKE Unit ZI	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI							dilaksanakan pada Triwulan II
Evaluasi pembangunan ZI oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke Tim Penilai Nasional (TPN)	Surat Pengajuan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Proses evaluasi oleh TPN	Hasil Konfirmasi Progress Evaluasi ZI di Sekretariat Jenderal DPR RI	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian PANRB	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Dalam upaya pelaksanaan rencana aksi penetapan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, telah diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1249/SEKJEN/2025 tentang Penetapan Unit Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI menuju WBBM adalah sebagai berikut:

1. Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional;
2. Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif;
3. Biro Persidangan II;
4. Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara; dan
5. Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat.

Melalui Surat Keputusan tersebut ditetapkan pula unit kerja yang melaksanakan pembangunan ZI menuju WBK adalah sebagai berikut:

1. Biro Persidangan I;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Pusat Teknologi Informasi;
5. Biro Pemberitaan Parlemen;
6. Biro Keuangan;
7. Biro Perencanaan dan Organisasi; dan
8. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat.

Kemudian dari 8 (delapan) unit kerja yang diusulkan menjadi unit pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) unit kerja yang telah dilaksanakan pendampingan pembangunannya oleh Inspektorat Utama, yaitu:

1. Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;
2. Biro Kesekretariatan Pimpinan;
3. Biro Pemberitaan Parlemen;
4. Biro Persidangan I;
5. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
6. Biro Biro Keuangan; dan
7. Pusat Teknologi Informasi.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/33fqD3RExKxFW7w>

7. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPKP	3,6	3,69	Inspektorat II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melaksanakan proses Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) SPIP Terintegrasi secara substansi dan prosedur penilaian mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tim Penilaian Mandiri (PM) dan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI atau Surat Tugas tentang Tim atau Surat Tugas Penjaminan Kualitas (PK) yang mana pesertanya telah mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi SPIP	-	1	1	-	Rp. 5.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan III
Penyesuaian Dokumen Perencanaan Kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan	Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja Perjanjian Kinerja	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
capaian sebelumnya dan memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran							
Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI	Risk Register dan Laporan Evaluasi Risk Register dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko	1	-	-	-	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Menyesuaikan kebijakan manajemen risiko dalam Peraturan Sekretariat Jenderal No. 10 Tahun 2021 dengan kebijakan terkait integrasi penerapan manajemen risiko pada unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dalam Peraturan Sekretariat Jenderal No. 10 Tahun 2021	-	-	1	-	Rp. 4.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Menyempurnakan sistem informasi manajemen risiko instansi dengan menambahkan pihak yang terdampak dari setiap uraian risiko dan tren risiko yang muncul di setiap unit kerja	Laporan Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Melakukan monitoring dan dievaluasi secara berkala atas pelaksanaan sistem antikorupsi yang sudah ada (FCP)	Laporan monitoring atas dan evaluasi atas pedoman, peta proses bisnis dan SOP	-	-	-	1	Rp. 4.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penyesuaian dokumen Perencanaan Kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya dan memperbaiki indikator sasaran yang

masih belum relevan dalam mencapai sasaran, telah terlaksana sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang dikirimkan oleh BPKP melalui Surat Nomor PE.09.02/LHP-154/D202/2/2024 tanggal 21 November 2024 terkait dengan indikator sasaran strategis yang belum memenuhi kriteria tepat dan baik. Beberapa poin yang disampaikan diantaranya:

- “Tingkat Kapabilitas APIP” yang cukup berada pada level program dan kegiatan Inspektorat Utama;
- “Presentasi realisasi anggaran” yang tidak relevan dengan sasaran kegiatan yang ingin dicapai dan *overlapping* dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
- Sasaran kegiatan “Nilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik” yang juga belum menunjukkan adanya *output* yang dapat diukur;
- “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI” dengan indikator skor maturitas SPIP yang belum berada di unit kerja manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI; dan
- Target kinerja indikator sasaran program yang belum memperhatikan capaian/realisasi tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, rekomendasi yang ditujukan adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menyesuaikan indikator kinerja pada sasaran strategis, sasaran program beserta target kinerjanya agar lebih tepat dan baik.

Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Utama melakukan kegiatan pengawasan untuk melakukan reviu maupun evaluasi sebagai *output* rencana aksi dalam rangka peningkatan kualitas atas penentuan indikator dan target kinerja pada sasaran strategis maupun sasaran program pada Perjanjian Kinerja di Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025. Evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah dilakukan pada tanggal 26 Februari s.d. 27 Maret 2025 oleh APIP Inspektorat II dengan Surat Tugas Nomor 090/PI.03/II/2025. Rekomendasi atas kegiatan evaluasi tersebut adalah “Agar Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan penyesuaian indikator kinerja, melakukan peninjauan dan revisi terhadap indikator sasaran strategis dan program untuk memastikan kesesuaian dengan level program dan kegiatan, melakukan penyesuaian dan berkoordinasi dengan Eselon I/II terkait indikator kinerja agar memenuhi kriteria SMART-C, dan menetapkan target yang menantang namun realistik, dengan mempertimbangkan tren dan potensi yang ada”.

Selanjutnya, rencana aksi mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI juga telah terlaksana. Rencana aksi dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh BPKP dengan Nomor: PE.09.02/LHP-154/D202/2/2024 tanggal 21 November 2024 terkait dengan menyempurnakan kualitas manajemen risiko di seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dengan mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Setjen DPR; Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh unit kerja dan pengambilan keputusan oleh manajemen; dan Menyusun kegiatan pengendalian dalam menangani *residual risk* untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik, diketahui pada Triwulan I telah dilakukan kegiatan penyusunan *Risk Register* yang merupakan bentuk dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi *Risk Register* dan monitor penanganan risiko.

Penyusunan *Risk Register* telah dipenuhi per tanggal 14 Februari 2025. Evaluasi *Risk Register* telah dilakukan oleh APIP pada tanggal 2 Oktober 2024 sampa dengan 31 Oktober 2024. Kegiatan monitoring penanganan risiko juga telah dilakukan secara berkala pada Semester I dan Semester II Tahun 2024. Penyusunan manajemen risiko dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai lini pertama. Penyusunan *Risk Register* digunakan sebagai dasar penilaian atas pencapaian kinerja. Hal ini dikarenakan penyusunan *Risk Register* dilakukan berdasarkan indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja dalam mengidentifikasi risiko kegagalan dan pengendalian yang dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/t7MzLfR86oAYT7R>

8. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	5	5	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian	
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Pengelolaan Pengaduan Administrator LAPOR	Tim dan SP4N-	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Koordinasi pembahasan tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat		Koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat dengan unit kerja terkait dalam Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR	-	1	-	-	Rp. 8.100.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Koordinasi tindak lanjut pengaduan masyarakat		Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga	-	-	1	-	Rp. 22.733.000	Rencana Aksi akan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
dengan Kementerian/Lembaga terkait pengaduan	terkait pengaduan (teradu pengaduan masyarakat)						dilaksanakan pada Triwulan III
FGD optimalisasi tindak lanjut pengaduan masyarakat	Meningkatnya tindak lanjut pengaduan masyarakat	1	-	-	-	Rp. 5.850.000	Telah terlaksana
Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	SDM yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan masyarakat	-	-	1	-	Rp. 51.600.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR dan Sidumas	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui SP4N LAPOR dan Sidumas	-	-	-	2	Rp. 4.050.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR telah terlaksana dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 177/SEKJEN/2025. Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan dan Administrator SP4N-LAPOR dilaksanakan agar pemngelolaan pengaduan yang dilakukan oleh administrator LAPOR di Setjen DPR (baik admin instansi ataupun pejabat pendukung) dapat berjalan dengan baik dan bersinergi. Tim ini dibuat pada bulan Januari 2025 yang berarti pelaksanaannya sesuai target.

Kemudian FGD optimalisasi tindak lanjut pengaduan Masyarakat pun telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2025 di Ruang Rapat Sekretariat BAKN. Rencana aksi ini dimaksudkan agar Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) selaku *supporting system* dan pejabat penghubung serta Bagian Pengaduan Masyarakat sebagai admin instansi dapat memetakan permasalahan dan peluang pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N LAPOR. Adapun rencana aksi ini dilakukan melalui kegiatan diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dan Setjen DPR melalui aplikasi SP4N LAPOR.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/FZ3c7A2kGN3mECA>

9. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	77,15	78	Inspektorat Utama

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target RB sesuai rencana atas indikator ZI	1	1	1	1	Rp. 7.425.000	Telah terlaksana
Pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi, dan/atau Monitoring dan Evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025	Memastikan kemajuan, identifikasi hambatan, dan penyesuaian strategi guna mencapai target RB sesuai rencana atas indikator SPI	1	1	1	1	Rp. 4.950.000	Telah terlaksana
Anti Corruption Week pada hari Anti Korupsi dunia	Membangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Kegiatan Pemenuhan Data Responden Internal, Eksternal, dan Ekspert untuk pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025	Mengumpulkan data yang akurat dan komprehensif guna mendukung pelaksanaan SPI KPK Tahun 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Evaluasi terkait Kebijakan dan SOP Anti Korupsi serta implementasinya	Membangun budaya integritas dan sistem pencegahan dan penindakan yang terintegrasi	-	1	-	-	Rp. 4.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Rencana aksi pelaksanaan kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025 telah dilaksanakan oleh Inspektorat Utama. Kegiatan pendampingan Pembangunan unit ZI WBK/WBBM yang meliputi penyusunan rencana aksi

dan tindak lanjut atas hasil evaluasi ZI telah dilakukan atas seluruh unit kerja Pembangunan ZI, sebagai berikut:

- Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat;
- Biro Kesekretariatan Pimpinan;
- Biro Pemberitaan Parlemen;
- Biro Persidangan I;
- Biro Sumber Daya Manusia Aparatur;
- Biro Biro Keuangan; dan
- Pusat Teknologi Informasi

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan rencana aksi, dan/atau monitoring dan evaluasi untuk Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025 juga telah dilaksanakan dengan baik oleh Inspektorat Utama selama Triwulan I.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/JjTfDmZi6iw3kz7>

10. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025		Penanggung Jawab
Kementerian Hukum dan HAM	100	100		Pusat Perancangan Undang-Undang

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Membuat Surat Pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	Surat pernyataan terkait Variabel I IRH ke Kementerian Hukum	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Menyusun TOR terkait Pelatihan Peningkatan Kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	TOR Pelatihan Peningkatan Kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	TOR pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi Perancang Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 75.600.000	Telah terlaksana
	Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra (FGD/Workshop/Seminar)	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Menyusun Surat Keputusan dan Surat Tugas kegiatan kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang	Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	Mahkamah Konstitusi						
	Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Menyusun laporan hasil kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
	Dokumen laporan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan Undang-Undang dan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi	8	7	7	3	Rp. 273.985.000	Telah terlaksana
Mengirim rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	Dokumen bukti dukung pengiriman rekomendasi hasil kegiatan kajian dan evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Menyusun dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif yang dilibatkan dalam melakukan kajian dan evaluasi Undang-Undang	Dokumen rekap data pejabat fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan pengumpulan Data Dukung Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	Dokumen Terkait Kebijakan Pengelolaan JDIH di Sekretariat Jenderal DPR RI (Peraturan, Keputusan, SOP)	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Melaksanakan pengembangan JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI (dengan kegiatan <i>Benchmarking, Konsinyering</i>)	Laporan Kegiatan <i>Benchmarking</i>	-	1	-	-	Rp. 25.080.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Melaksanakan pelaporan Pengembangan JDIH melalui e-Report	Screenshot bukti pengisian e-Report	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Membuat Abstrak Peraturan yang diunggah ke Website JDIH	Dokumen terkait Abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Mengumpulkan Capture Metadata Pengolahan Dokumen Hukum, URL Integrasi, Log Sinkronisasi Integrasi, Media Sosial	Screenshot Dashboard Portal JDIH	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Mengunggah aktifitas Pengelolaan dan Pengembangan JDIH, serta informasi mengenai JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Media Sosial JDIH (Instagram)	Screenshot bukti upload di media sosial	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Menyusun Rekapitulasi Data Produk Hukum yang telah diunggah di JDIH	Dokumentasi hasil rekapitulasi data produk hukum yang telah diunggah di JDIH	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Selama Triwulan I Tahun 2024, Tim IRH Setjen DPR telah melaksanakan seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham melaksanakan Webinar dengan tema “Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana” yang diselenggarakan tanggal 23 Januari 2025. Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekuinbangkesra kemudian melaksanakan FGD dengan tema “Evaluasi dan Penataan Undang-Undang di bidang Pendidikan untuk mewujudkan sinergitas sistem Pendidikan Nasional” yang diselenggarakan tanggal 6 Maret 2025.

Selanjutnya, Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang telah melaksanakan:

- Penyusunan 1 (satu) Surat Keputusan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Penyusunan 1 (satu) Surat Tugas Tim Penyusunan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Penyusunan 1 (satu) Dokumen Daftar Undang-Undang yang telah dilakukan evaluasi;
- Penyusunan 8 (delapan) Dokumen Laporan Hasil Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang serta Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi;
- Pengiriman 1 (satu) Dokumen Rekomendasi Hasil Kegiatan Kajian dan Evaluasi Undang-Undang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau kegiatan pemantauan pelaksanaan Undang-Undang ke AKD;
- Penyusunan rekap data Pejabat Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif.

Pada saat bersamaan, Biro Hukum telah menyusun dokumen terkait abstrak Peraturan yang diunggah di website JDIH Setjen DPR. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh rencana aksi IRH Triwulan I telah sepenuhnya terlaksana.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Zd3ngogXpSTxgo9>

11. Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
ANRI	98,09	98,09	Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemeliharaan Kaset	Terpeliharanya Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 199.800.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan CD/DVD	Terpeliharanya Arsip CD/DVD	1	-	-	-	Rp. 175.158.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan <i>Mobile File (Roll O Pack)</i>	Terpeliharanya <i>Mobile File</i>	1	-	-	-	Rp. 140.415.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Mesin Cacah	Terpeliharanya Mesin Cacah	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Pemeliharaan Lemari Kaset	Terpeliharanya Lemari Penyimpanan Arsip Kaset	1	-	-	-	Rp. 89.910.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Satu	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Dua	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana
Sewa Ruang Arsip Tiga	Tersedianya Ruang Penyimpanan Arsip	1	1	1	1	Rp. 226.229.000	Telah terlaksana
<i>Workshop/Bimtek/Seminar/Focus Group Discussion (FGD)</i>	Terselenggaranya kegiatan <i>Workshop/Bimtek/Seminar/(FGD)</i>	2	1	2	1	Rp. 112.500.000	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penataan Persidangan Arsip	Tertatanya Arsip Persidangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Administrasi	Tertatanya Arsip Bidang Administrasi	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Keuangan	Tertatanya Arsip Bidang Keuangan	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Arsip Bidang Kepegawaian	Tertatanya Arsip Bidang Kepegawaian	1	-	-	-	Rp. 100.000.000	Telah terlaksana
Penataan Barang/Jasa Arsip	Tertatanya Arsip Barang/Jasa	1	-	-	-	Rp. 50.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Komisi	Tertatanya Kaset Rekam Suara Komisi	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Badan	Tertatanya Kaset Rekam Suara Badan	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Kaset Legislasi	Tertatanya Kaset Rekam Suara Legislasi	1	-	-	-	Rp. 75.000.000	Telah terlaksana
Penataan Mini DV	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Digitalisasi Kaset Persidangan Satu	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Digitalisasi Kaset Panja	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Digitalisasi Kaset Fit dan Proper Test	Arsip Kaset Pita Suara menjadi MP3	-	1	-	-	Rp. 150.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Digitalisasi Mini DV	Kaset Pita menjadi MP4	-	1	-	-	Rp. 192.500.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Digitalisasi Kepegawaian	Arsip	Arsip Konvensional kertas menjadi pdf	1	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana

Selama periode Triwulan I, Bagian Arsip telah melaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka mencapai target Indeks Digitalisasi Arsip, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Perangkat Kearsipan;

Pemeliharaan Perangkat Kearsipan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan kelayakan perangkat Kearsipan sehingga arsip yang disimpan dan dikelola dapat terjaga baik fisik maupun informasi arsipnya. Adapun Kegiatan Pemeliharaan Perangkat Kearsipan terdiri dari :

- a. Pemeliharaan Arsip CD/DVD;
- b. Pemeliharaan Arsip Kaset;
- c. Pemeliharaan Lemari *Full Out*;
- d. Pemeliharaan *Mobile File (Roll o Pack)*.

2. Sewa Ruang Penyimpanan Arsip Boks Arsip

Kegiatan Sewa Ruang Penyimpanan dilaksanakan, dikarenakan kapasitas *Record Center* yang dimiliki oleh Bagian Arsip tidak dapat menampung arsip seluruhnya, sehingga diperlukan penambahan Ruang penyimpanan arsip. Adapun hal ini dilakukan untuk mencegah hilangnya arsip yang telah dipindahkan oleh Unit Kerja di Setjen DPR kepada Bagian Arsip untuk kemudian dilakukan pengelolaan arsip dan perawatan arsip, agar arsip tetap terjaga baik fisik dan informasinya.

3. Penataan Arsip

Kegiatan Penataan Arsip dilaksanakan terhadap arsip-arsip yang telah diserahkan oleh Unit Pengolah di Setjen DPR kepada Bagian Arsip sebagai Unit Kearsipan DPR RI. Arsip – arsip inaktif tersebut dilakukan verifikasi dan alihmedia (digitalisasi) berdasarkan Pedoman Alih Media Arsip yang ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip DPR. Arsip yang telah dilakukan alihmedia kemudian ditata dan disimpan ke dalam lemari penyimpanan arsip berdasarkan klasifikasi arsip (Jenis Arsip, Tahun Arsip, dan/atau asal – usul arsip).

4. Digitalisasi Arsip

Kegiatan Digitalisasi Arsip dilakukan terhadap arsip-arsip yang memiliki hasil akhir permanen dan memiliki nilai guna, salah satu contoh arsip yang dapat dilakukan digitalisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Alih Media Arsip DPR adalah Arsip Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang (Arsip Legislasi) dan Arsip Personal File Anggota DPR. Digitalisasi Arsip dilakukan dengan tujuan untuk menjaga informasi arsip, serta memudahkan dalam melakukan pelayanan informasi. Dengan dilakukan digitalisasi arsip, maka layanan

informasi menjadi lebih efektif dan efisien.

5. Peningkatan Kapasitas SDM

Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi SDM Kearsipan di Sekretariat Jenderal DPR RI terhadap Pengelolaan Arsip. Peningkatan Kapasitas SDM ini dilakukan melalui sub kegiatan Pembinaan Kearsipan, Sosialisasi, *Workshop*, Bimbingan Teknis, Bimbingan Konseling, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Peningkatan kapasitas difokuskan terhadap SDM Arsiparis dan SDM Pengolah Arsip di masing-masing Unit Pengolah di Setjen DPR.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/Eetx2rRe9sFefF9>

12. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Indeks Pembangunan Statistik

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025		Penanggung Jawab
Badan Pusat Statistik	2,57	2,6		Pusat Teknologi Informasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Melakukan reviu dan evaluasi penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	Laporan reviu dan evaluasi penerapan Prinsip Satu Data Indonesia	1	-	1	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Melakukan reviu dan evaluasi prosedur pelaksanaan Satu Data DPR RI	Laporan reviu dan evaluasi prosedur pelaksanaan Satu Data DPR RI	1	-	-	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembuatan dokumen pemetaan dan relevansi data	Dokumen pemetaan dan relevansi data	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Publikasi data statistik sektoral di Portal Satu Data DPR RI	Data statistik di Portal Satu Data DPR RI	2	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Mengajukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS	Surat rekomendasi dari BPS terkait kegiatan statistik yang akan dinilai	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Pada rencana aksi reviu dan evaluasi penerapan Prinsip Satu Data Indonesia telah dilaksanakan oleh Pusat Teknologi Informasi bersama Tim Pembina Statistik Sektoral (PSS) dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui rapat daring pada 20 Februari 2025. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi standar data statistik dan metadata statistik sesuai kaidah dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Kegiatan ini juga menindaklanjuti hasil penilaian EPSS 2024 serta memberikan penguatan terhadap bukti dukung yang diperlukan untuk mencapai level kematangan lebih tinggi dalam domain Prinsip Satu Data.

Rapat tersebut mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Statistik Setjen DPR yang telah mencapai 2,57 pada tahun 2024, serta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mendorong pencapaian level 4 dan 5, seperti pelaksanaan reviu berkala, dokumentasi kondisi sebelum dan sesudah evaluasi, serta pengisian metadata statistik pada *platform* INDAH. Evaluasi dilakukan tidak hanya terhadap kesesuaian standar data statistik (SDS) dan metadata, tetapi juga terhadap interoperabilitas data dan pemanfaatan kode referensi sesuai pedoman Forum Satu Data Indonesia.

Selain melakukan reviu dan evaluasi terhadap penerapan Pinsip Satu Data Indonesia, Pusat Teknologi Informasi juga telah melaksanakan reviu dan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan Satu Data DPR RI melalui Rapat Koordinasi terkait Domain Kualitas Data dan Evaluasi SOP Penjaminan Kualitas Data Bersama BPS yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 di Hotel Tentrem. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi aspek kualitas data statistik sektoral DPR RI, khususnya dalam hal relevansi, akurasi, aktualitas, aksesibilitas, serta koherensi data. Selain itu, rapat juga membahas revisi dan penyusunan SOP Penjaminan Kualitas Data yang lebih rinci dan aplikatif. Rapat ini menghasilkan kesepakatan untuk menyusun empat petunjuk teknis sebagai turunan dari SOP Penjaminan Kualitas Satu Data DPR RI, yang mencakup aspek identifikasi kebutuhan data, relevansi terhadap pengguna, akurasi, dan ketepatan waktu. Langkah ini merupakan bentuk konkret dari komitmen Pusat Teknologi Informasi dalam memperkuat tata kelola statistik sektoral yang berkualitas dan siap dievaluasi dalam penilaian EPSS 2025.



Gambar 1.3 Rapat Koordinasi terkait Domain Kualitas Data dan Evaluasi SOP Penjaminan Kualitas Data bersama BPS

Kemudian rencana aksi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada BPS juga juga telah terlaksana melalui Rapat Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik bersama BPS pada tanggal 27 Februari 2025. Kegiatan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen Setjen DPR dalam menjamin keberlanjutan dan legalitas kegiatan statistik sektoral melalui mekanisme pembinaan dan pemberian rekomendasi resmi oleh BPS.

Dalam rapat tersebut, dua kegiatan statistik yang diajukan adalah: (1) Kompilasi Data Pengaduan Masyarakat ke DPR RI dan (2) Pendataan Lengkap Anggota DPR RI. Hasil dari proses pengajuan ini adalah diterbitkannya Surat Rekomendasi dari BPS dengan nomor identifikasi K-25.0000.040 dan V-25.0000.008, yang menyatakan bahwa kedua kegiatan tersebut layak untuk dinilai dalam EPSS 2025. Rekomendasi ini mencakup panduan penyajian data, penyusunan metadata statistik, serta penerapan standar proses bisnis statistik berdasarkan model GSBPM.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa Setjen DPR telah memenuhi aspek fundamental dalam siklus statistik sektoral, yakni mendapatkan pengakuan resmi dari instansi pembina statistik nasional. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kegiatan statistik yang dilakukan memiliki standar, kualitas, dan interoperabilitas yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.



Gambar 1.4 Rapat Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik bersama BPS

Namun, rencana aksi publikasi data statistik sektoral di Portal Satu Data DPR RI belum terlaksana sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/CabS6fqq7PHRjxz>

13. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
LKPP	75,5	80	Biro Umum

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku PBJ	Kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara berkala, dan forum koordinasi konsultasi dengan mitra.	3	3	3	3	Rp. 271.600.000	Telah terlaksana
Penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari indikator pemanfaatan sistem pengadaan	Surat Klarifikasi Pagu Pengadaan, Surat Pemberitahuan Penginputan SiRUP dan SPSE	3	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pencapaian skor untuk 6 indikator turunan dari Indikator pemanfaatan sistem	Tercapainya target skor untuk 6 indikator dengan <i>cut-off</i> data yang berbeda	2	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Pembaharuan rencana aksi pemenuhan SDM Pengelola PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP	Pembaharuan rencana aksi pemenuhan SDM Pengelola PBJ	1	1	-	1	Rp. 70.815.000	Telah terlaksana
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari pengangkatan pertama	Pelantikan CPNS 2025 untuk posisi JF PPBJ Ahli Pertama	-	1	-	-	Rp. 29.700.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemenuhan SDM JF PPBJ dari promosi	Pelantikan kenaikan jenjang (promosi) JF PPBJ Ahli Pertama menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 252.700.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemenuhan SDM JF PPBJ melalui perpindahan jabatan lain	Terlaksananya pelantikan perpindahan JF Lainnya Ahli Muda menjadi JF PPBJ Ahli Muda sebelum 31 Oktober 2025	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemenuhan persyaratan pengajuan penetapan PKP – BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR	Dokumen atau Verifikasi terpenuhinya persyaratan pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif (5 indikator)	-	-	5	-	Rp. 263.250.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pengajuan penetapan PKP - BJ Proaktif bagi UKPBJ DPR	Surat Pengajuan Penetapan PKP-BJ Proaktif	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Rencana aksi optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan oleh pelaku PBJ, penerbitan dokumen pendukung tercapainya skor dari indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dan pencapaian skor untuk 6 indikator turunan dari indikator pemanfaatan sistem telah terlaksana melalui serangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan. Pada bulan Januari, dilaksanakan 4 (empat) kegiatan pendampingan penginputan SiRUP sebanyak 2 (dua) kali kegiatan, pencatatan SPSE, dan bimtek pendaftaran akun INAPROC dan penggunaan eKatalog versi 6. Selain kegiatan yang dilaksanakan di dalam kantor, juga dilaksanakan FGD tentang optimalisasi sistem pengadaan dan peningkatan maturitas UKPBJ Setjen DPR menuju Pusat Keunggulan PBJ, sebagai bagian dari rencana aksi UKPBJ DPR RI dalam meraih skor optimal di indikator pemanfaatan sistem pengadaan dan persiapan untuk pengajuan menjadi PKP-BJ Proaktif.

Pada bulan Februari, dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan monitoring dan evaluasi pencatatan SPSE, FGD e-katalog versi 6 dan pembuatan akun bendahara, dan konsultasi kendala teknis

pada Aplikasi SiRUP. Sebelum bulan Februari berakhir, sesuai arahan KPA dan Kepala Biro Umum, bahwa RUP tahun 2025 diumumkan 100% di bulan Februari, maka dilaksanakan rapat koordinasi dengan PPK, Pejabat Pengadaan, dan para operator SiRUP di unit kerja untuk finalisasi inputan SiRUP, dan secara serentak diumumkan, sehingga DPR RI pada tahun 2025 kembali berhasil mengumumkan RUP 100%.

Selain kegiatan, upaya yang mendukung meningkatkan pemanfaatan sistem pengadaan adalah berupa penerbitan dokumen kedinasan, yaitu Surat Klarifikasi Pagu Pengadaan DPR RI Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala LKPP yang dilakukan 2 (dua) kali. Hal ini untuk memastikan bahwa Pagu yang menjadi ukuran kinerja pengadaan barang/jasa adalah hanya Pagu Pengadaan. Lalu, diterbitkan juga pemberitahuan tentang tender Pra DIPA, dan pengisian RUP tahun 2025 pada Aplikasi SiRUP sejak bulan September 2024. Kemudian kembali dilakukan himbauan untuk memastikan tidak ada RUP yang terlewat untuk diinput, dengan menerbitkan himbauan di bulan Januari dan Februari 2025.

Upaya lainnya adalah memastikan pencapaian skor untuk 6 sub indikator pemanfaatan sistem pengadaan berhasil memberikan skor optimal dengan dibuktikan oleh laporan dari LKPP. Namun, sampai dengan dokumen ini diterbitkan, laporan dimaksud belum dipublikasi oleh LKPP. Hanya salah satu eviden yang dapat disajikan adalah skor SiRUP di angka maksimal yaitu 10, karena DPR RI kembali berhasil mencapai RUP diumumkan 100% pada Aplikasi SiRUP, seperti gambar di bawah ini.

Kemudian rencana aksi pembaharuan rencana aksi pemenuhan SDM Pengelola PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP juga telah terkasana. Dalam upaya pemenuhannya, DPR RI telah melaksanakan strategi di tahun 2024 berupa penyesuaian jumlah rekomendasi JF PPBJ, semula 23 (dua puluh tiga) orang menjadi 15 (lima belas) orang. Dokumen rencana aksi pemenuhan SDM PBJ pada Aplikasi SIRENAKSI LKPP yang diajukan di tahun 2024 harus disesuaikan dengan jumlah rekomendasi terbaru yang berdampak juga pada strategi pemenuhannya, sehingga upaya yang pertama dilakukan di tahun 2025 adalah memperbaharui dokumen pemenuhan SDM JF PPBJ, yaitu dokumen penghitungan bobot beban kerja untuk JF Ahli Pertama dan JF Ahli Muda, dokumen permohonan penyesuaian rekomendasi JF PPBJ ke Kementerian PANRB dan LKPP hingga mendapatkan persetujuan, mengunggah dokumen persetujuan dan pelantikan JF PPBJ Ahli Pertama yang berhasil dilantik di akhir tahun 2024 agar dapat diakui di tahun 2025. Seluruh dokumen tersebut diunggah ke Aplikasi SIRENAKSI LKPP untuk dilakukan verifikasi dan koreksi bila perlu.

Kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia juga harus memperhatikan kapasitas dan kompetensi SDM PBJ yang terus ditingkatkan. Maka, pada Triwulan I telah dikirimkan 10 (sepuluh) orang SDM PBJ yang terdiri dari JF PPBJ dan pengelola PBJ untuk mengikuti pelatihan intensif tentang eKatalog versi 6, dengan target *output* yang utama adalah mampu mendampingi seluruh pelaku PBJ dalam masa transisi eKatalog versi 6. Di samping itu, juga sebagai strategi tercapainya rencana aksi promosi jenjang jabatan JF PPBJ Ahli Pertama menjadi JF PPBJ Ahli Muda dari tambahan nilai yang bersumber dari keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi.

Di samping rencana aksi di atas, Biro Umum juga aktif dalam mengupayakan peningkatan level kematangan UKPBJ melalui serangkaian proses yang dilakukan sejak Triwulan I untuk kemudian memperoleh hasil di Triwulan III atau Triwulan IV. Progres yang telah dilaksanakan antara lain ditetapkannya 2 (dua) orang SDM di Bagian PBJ menjadi Mentor Kematangan

UKPBJ Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh LKPP untuk menjadikan perwakilan dari K/L dapat membantu percepatan UKPBJ mencapai kematangan level 3 Proaktif, dan persiapan menjadi PKP – BJ Proaktif bagi UKPBJ yang telah berhasil mendapatkan sertifikat kematangan level 3 Proaktif. Tugas dari mentor Kematangan UKPBJ sejalan dengan target/indikator yang harus dicapai jika UKPBJ akan mengajukan penetapan sebagai PKP-BJ Proaktif di tahun 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/LsjGc98YyNAG6yi>

14. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset:

a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	90,24	96	Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Sosialisasi dan Pengembangan Aplikasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sosialisasi IKPA kepada Unit Kerja dan Pengembangan Modul IKPA di Aplikasi DigitAll	1	-	-	-	Rp. 753.397.120	Telah terlaksana
Evaluasi Nilai IKPA Satker Setjen dan Dewan	Laporan Evaluasi Nilai IKPA Satker Setjen dan Satker Dewan	-	-	1	1	Rp. 1.450.794.240	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Revisi Kewenangan KPA	Dokumen Laporan Revisi Kewenangan KPA	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Revisi Kewenangan Kanwil/DJA	Dokumen Laporan Revisi Kewenangan Kanwil/DJA	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Pemutakhiran RPD per Triwulan	Laporan Pemutakhiran RPD	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengelolaan Penyerapan Anggaran	Laporan Penyerapan Anggaran	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengelolaan Penyelesaian Tagihan	Laporan Penyelesaian Tagihan	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengelolaan Capaian Output	Laporan Capaian Output	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Selama Triwulan I Tahun 2025, Biro Keuangan telah melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka memenuhi target capaian Nilai IKPA, diantaranya:

1. Sosialisasi terkait IKPA

Terlaksananya sosialisasi terkait IKPA pada Kegiatan Aplikasi dan Peraturan Keuangan di Bagian Administrasi Keuangan (SAPAKeu) kepada Unit Kerja dan Pengembangan Modul IKPA di Aplikasi DigitAll di Ruang Rapat Badan Legislasi pada hari Rabu s.d Jumat, 8 s.d 10 Januari 2025.

2. Evaluasi Nilai IKPA DPR RI

Evaluasi IKPA DPR RI Tahun 2024 dilaksanakan pada kegiatan *Workshop Leadership* dan Sosialisasi Penyampaian Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sekertariat Jenderal DPR RI Tahun Anggaran 2025 di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah bersama dengan satuan kerja. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 Januari 2025 dengan menggunakan Anggaran dari Biro Keuangan.

3. Kegiatan Penilaian Revisi DIPA

Penilaian Revisi DIPA oleh Unit Kerja oleh Bagian Perencanaan dilakukan rekapitulasi tiap bulan dan diinput ke dalam Aplikasi Digitall Modul IKPA oleh Bagian Administrasi Keuangan.

4. Kegiatan Pemutakhiran RPD per Triwulan

Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait Pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dilakukan oleh Biro Keuangan pada tanggal 3 Januari 2025 bersama Tim PKORB dengan materi sebagai berikut:

- a. Pemaparan terkait Perjanjian Kinerja Eselon II seluruh Unit Kerja;
- b. Penginputan RPD Triwulan I yang sudah bisa dimulai sampai batas waktu yang disesuaikan dengan tanggal dari Bagian; dan
- c. Perencanaan Rapat Koordinasi terkait Pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD).



Gambar 1.5 Rapat Koordinasi terkait Pengisian Rencana Penarikan Dana (RPD)

5. Kegiatan terkait Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Capaian *Output* Biro Keuangan dan Biro Perencanaan dan Organisasi bekerjasama untuk mengelola IKPA terkait Indikator Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan dan Capaian *Output* berupa koordinasi bersama unit kerja secara rutin, koordinasi bersama KPPN Jakarta VII dan kerjasama dengan Kementerian Keuangan dalam rangka sinkronisasi data dari Aplikasi Eksternal (SAKTI) ke Aplikasi Internal (Modul IKPA).
6. Pengembangan Aplikasi Modul IKPA
Upaya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap capaian nilai IKPA dilakukan melalui pengembangan Aplikasi Modul IKPA pada sistem DigitAll. Pengembangan ini mencakup penambahan fitur untuk mempermudah proses *input* data, validasi indikator, serta penyajian laporan yang lebih informatif dan *real-time*. Selain itu, pengembangan juga mencakup sinkronisasi data dengan aplikasi eksternal seperti SAKTI guna meningkatkan akurasi data yang ditampilkan dalam Modul IKPA.
7. Penyiapan Instruksi Sekretaris Jenderal terkait Rapor IKPA Mini
Biro Keuangan sedang menyusun draft Perubahan Instruksi Sekretaris Jenderal mengenai Rapor IKPA Mini sebagai langkah untuk memperkuat pemantauan terhadap capaian IKPA di setiap unit kerja. Instruksi ini membantu unit kerja agar dapat secara berkala melakukan evaluasi mandiri atas kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing. Rapor IKPA Mini akan memuat indikator-indikator utama yang menjadi acuan dalam menetapkan langkah perbaikan yang diperlukan.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa rencana aksi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Triwulan I telah terlaksana sepenuhnya.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/BPrtfR5c8DwHLk>

b. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian Keuangan	3,9	3,9	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring penyelesaian tindaklanjut temuan BPK LKPP BMN	Kegiatan rekonsiliasi dengan unit kerja pemilik temuan dan Kementerian Keuangan	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Monitoring capaian realisasi PNBP yang berasal dari Pengelolaan BMN	Kegiatan rekonsiliasi PNBP	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Penyampaian Laporan kepada Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan RKBMN T+2; • Laporan Barang Pengguna; • Laporan Pengawasan dan Pengendalian 	3	-	2	1	Rp. 0	Telah terlaksana
Pengajuan asuransi untuk objek BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019	Dokumen Polis asuransi terhadap BMN di DPR RI	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
Monitoring terhadap persetujuan dan tindaklanjut pengelolaan BMN	Laporan kegiatan rekonsiliasi internal antara tindak lanjut pengelolaan BMN dengan Aplikasi SIMANv2	1	1	1	1	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Monitoring : • Penghapusan BMN rusak berat; • Penetapan Status Penggunaan; • SBSK Gedung dan Bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan penghapusan BMN rusak berat; Laporan usulan PSP; Laporan pengajuan SBSK 	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Peningkatan Kapasitas SDM	Laporan kegiatan Bimtek/Workshop/Paket Meeting terkait Pengelolaan BMN	2	-	-	1	Rp. 200.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi monitoring capaian realisasi PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN telah dilaksanakan oleh Biro Keuangan. Berdasarkan kegiatan monitoring tersebut, capaian realisasi PNBP menunjukkan angka yang mendekati atau melebihi target, berasal dari kegiatan sewa, kerja sama pemanfaatan, atau penjualan aset. Ini membuktikan bahwa BMN dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap APBN, sesuai prinsip efisiensi dan nilai tambah aset.

Kemudian rencana aksi penyampaian Laporan kepada Kementerian Keuangan juga telah terlaksana. Laporan yang meliputi Laporan Barang Pengguna (LBP), Pengawasan BMN, dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah disampaikan melalui SIMAN dan sistem pelaporan lainnya secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan. Hal ini mencerminkan kepatuhan administratif dan menjadi bukti bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara tertib dan transparan.

Selanjutnya, rencana aksi pengajuan asuransi untuk objek BMN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2019 telah dilaksanakan dengan tujuan penerapan manajemen risiko aset negara, yang merupakan salah satu praktik *good governance* dalam pengelolaan BMN. BMN strategis atau bernilai tinggi telah diasuransikan secara aktif, polis telah diterbitkan, dan premi telah dibayar.

Rencana aksi monitoring terhadap persetujuan dan tindaklanjut pengelolaan BMN juga telah dilaksanakan dengan memastikan seluruh usulan penghapusan, pemanfaatan, dan pemindahtempat BMN ditindaklanjuti sesuai persetujuan DJKN, serta menyusun dokumentasi sebagai bukti kepatuhan dan pengendalian. Setiap persetujuan dari DJKN pun (misal: penghapusan, pemanfaatan, hibah) telah ditindaklanjuti secara tepat waktu dan sesuai

prosedur, dengan bukti pelaksanaan yang terdokumentasi. Dengan begitu, konsistensi antara rencana dan implementasi kebijakan pengelolaan BMN dapat terjaga.

Di samping itu, rencana aksi monitoring penghapusan BMN rusak berat, penetapan status penggunaan, dan SBSK Gedung dan Bangunan telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan penataan aset secara legal, efisien, dan berbasis kebutuhan aktual, sehingga meningkatkan kualitas tata kelola aset. Rencana aksi terakhir, yaitu peningkatan kapasitas SDM juga telah dilaksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman SDM dalam pengelolaan BMN serta menunjang keberhasilan implementasi seluruh parameter IPA.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/i8ZRgRGHMnTC9AP>

c. Opini BPK

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
BPK	WTP	WTP	Biro Keuangan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penagihan TLHP BPK	Kegiatan penagihan TLHP BPK	2	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal	Laporan Keuangan dengan tepat waktu	3	3	3	3	Rp. 0	Telah terlaksana
Rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal	Laporan Keuangan dengan Tepat Waktu	1	1	1	1	Rp. 600.000.000	Telah terlaksana
Pengembangan Aplikasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Pengembangan aplikasi PIPK	-	-	-	1	Rp. 200.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Sosialisasi Penyusunan <i>Risk Register</i> Tabel A PIPK	Sosialisasi Penyusunan <i>Risk Register</i> Tabel A PIPK	1	-	-	-	Rp. 150.000.000	Telah terlaksana

Rencana aksi penagihan TLHP BPK telah dilaksanakan pada tanggal 13 – 15 Januari 2025 oleh Tim dari Bagian Administrasi Keuangan terhadap 12 (dua belas) mantan Anggota DPR

RI terkait kelebihan bayar Uang Muka Pajak Kendaraan sesuai dengan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Temuan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Kemudian rencana aksi rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal juga telah dilaksanakan oleh Penyusun Laporan Keuangan, Bendahara Penerimaan dan KPPN Jakarta 7 untuk periode sampai dengan Desember 2024 yang dilakukan pada Januari 2025. Sementara untuk Rekonsiliasi, telah dilakukan sepanjang Triwulan I TA 2025.



Gambar 1.6 Kegiatan Penagihan Piutang

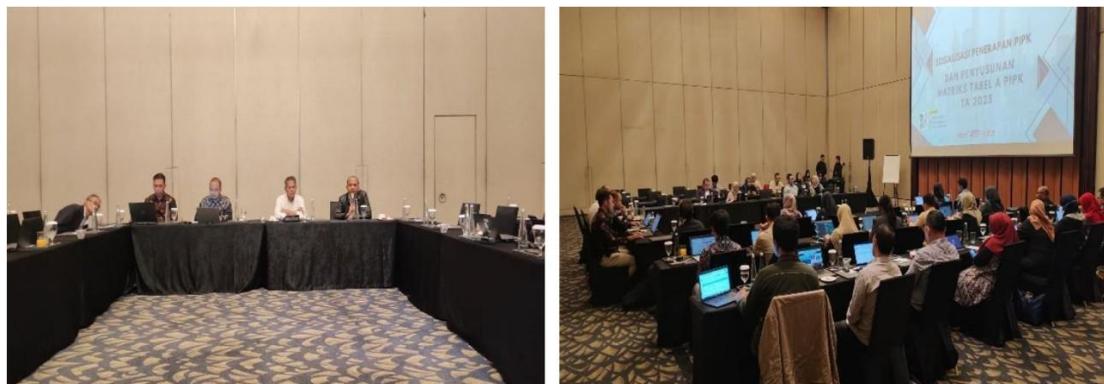
Selanjutnya, rencana aksi rekonsiliasi Laporan Keuangan Internal dilakukan Bagian Administrasi Keuangan dan Bagian Administrasi BMN untuk Periode Desember 2024 yang dilaksanakan di Hotel Episode Gading Serpong pada tanggal 23-25 Januari 2025. Rekonsiliasi dilakukan untuk membahas penyusunan Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited* 2024. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan rekonsiliasi eksternal dengan mengundang pihak Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Pembendaharaan Kementerian Keuangan dan PT Taspen dalam hal rekonsiliasi Piutang Pegawai.



Gambar 1.7 Rekonsiliasi Internal dan Eksternal Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Di samping itu, rencana aksi sosialisasi penyusunan *Risk Register* Tabel A PIPK dilaksanakan pada tanggal 19-20 Februari 2025 di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City. Paket

Meeting ini juga mengundang unit kerja yang berkaitan dengan risiko-risiko sesuai Akun Signifikan TA 2024 (Akun PNBP, Akun Belanja Perjalanan Dinas dan Akun Aset Tak Berwujud (ATB)). Unit kerja mengisi Matriks Tabel A dan didampingi oleh Biro Keuangan serta Narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.



Gambar 1.8 Sosialisasi Pengisian Matriks Tabel A Kepada Seluruh Unit Kerja Pemegang Akun Signifikan

Selain rencana aksi di atas, Bagian Administrasi Keuangan juga mempersiapkan fasilitas terkait pengembangan dan pembuatan aplikasi PIPK. Aplikasi ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019. Aplikasi ini diharapkan mempermudah pemantauan dan pelaporan pelaksanaan pengendalian oleh masing-masing unit kerja. Bersamaan dengan itu, Bagian Administrasi Keuangan secara aktif melakukan pendampingan kepada unit-unit kerja serta menyiapkan seluruh dokumen yang diminta oleh Tim Auditor BPK sebagai bagian dari upaya mendukung kelancaran pelaksanaan audit oleh BPK.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/3fxSEaeXfZZwkzB>

d. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

<i>Leading Sector</i>	<i>Capaian 2024</i>	<i>Target 2025</i>	<i>Penanggung Jawab</i>
BPK	88,24%	95%	Inspektorat Utama

<i>Rencana Aksi</i>	<i>Indikator Output</i>	<i>Target Penyelesaian</i>				<i>Jumlah Anggaran</i>	<i>Penjelasan Capaian</i>
		<i>TW 1</i>	<i>TW 2</i>	<i>TW 3</i>	<i>TW 4</i>		
Melakukan Monitoring/Pemantauan	Penyusunan Tim Penyelesaian Kerugian Negara	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	1	1	1	1	Rp. 50.050.000	Telah terlaksana

Selama Triwulan I Tahun 2025, Inspektorat Utama telah melaksanakan rencana aksi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Tim Penyelesaian Kerugian Negara

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara (PPKN) membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN). Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Tahun Anggaran 2025 terdiri dari unit kerja yang membidangi pengawasan internal; keuangan; administrasi BMN; dan kepegawaian yang kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7/SEKJEN/2025 tanggal 2 Januari 2025.

2. Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Tanggal 12 Februari 2025, BPK mengadakan *Entry Meeting* Pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2024 pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Rapat dihadiri oleh Tim Pemeriksaan BPK RI, Inspektorat Utama, serta Biro Keuangan sebagai entitas yang diperiksa. Pada rapat tersebut BPK memaparkan aspek-aspek yang akan diperiksa pada masing-masing unit kerja, beserta *timeline* kegiatan pemeriksaan.



Gambar 1.9 *Entry Meeting* BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan 2024

Selain rencana aksi di atas, Inspektorat Utama juga melaporkan bahwa pada periode Semester II 2024, Setjen DPR melalui Inspektorat Utama telah melakukan pemantauan tindak lanjut atas 73 (tujuh puluh tiga) rekomendasi dan mengusulkan alih status sebanyak 5 (lima) rekomendasi menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah).

Berdasarkan Risalah Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II 2024, diketahui 48 (empat puluh delapan) rekomendasi telah dinyatakan sesuai

dan sisanya 30 (tiga puluh) rekomendasi belum sesuai. Untuk hasil/persentase dari penyelesaian tindak lanjut tersebut belum diketahui dikarenakan masih dalam proses telaah oleh BPK RI dan hasilnya akan diterima oleh Sekretariat Jenderal DPR pada Triwulan II 2025.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/F9Y2KiJbzmHH7Sr>

15. Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional

<i>Leading Sector</i>	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
KASN	363	363	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyempurnaan Sistem dan Fitur SIMATA	Dokumen Penyempurnaan dan Penambahan Fitur SIMATA	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Sosialisasi SIMATA	Sosialisasi SIMATA	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Membuat Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Pedoman Pengelolaan Kinerja	-	1	-	-	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Melakukan Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu	-	1	-	-	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja Individu	-	1	-	-	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Pembaharuan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 5.670.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Penghargaan Pegawai	-	-	-	1	Rp. 145.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pada indikator kegiatan Penguatan Sistem Merit, Manajemen Talenta, Kinerja Pegawai dan Jabatan Fungsional, pelaksanaan rencana aksi dijadwalkan akan dimulai pada Triwulan II. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan I.

16. Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025		Penanggung Jawab
		TW 1	TW 2	
Kementerian PANRB	77,23%	77,23%		Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penyelenggaraan kuis BerAKHLAK di Portal Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 20.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pemberian Penghargaan Pemenang Kuis BerAKHLAK	Laporan Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Pemenang Kuis BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 8.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Internalisasi BerAKHLAK materi “ASN Profesional BerAKHLAK Mendukung/Menuju Parlemen Modern” pada agenda pengembangan kompetensi untuk pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang diselenggarakan oleh Pusbangkom	Laporan kegiatan pelaksanaan pemberian materi pada Agenda Pengembangan Kompetensi Pegawai	-	-	-	1	Rp. 36.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyelenggaraan Seminar dan/atau Webinar Series BerAKHLAK	Laporan pelaksanaan kegiatan seminar dan/atau webinar series BerAKHLAK	-	-	-	1	Rp. 438.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Penyelenggaraan Podcast BerAKHLAK	Laporan pelaksanaan kegiatan Podcast BerAKHLAK	-	-	1	-	Rp. 84.600.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Sosialisasi Nilai BerAKHLAK melalui media cetak, digital dan sosial	Laporan kegiatan pemasangan <i>Roll Baner</i> BerAKHLAK di seluruh pintu Gedung DPR RI	-	-	1	-	Rp. 5.500.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Pada indikator Indeks BerAKHLAK, target penyelesaian rencana aksi dijadwalkan akan dilaksanakan pada Triwulan III. Untuk itu, tidak terdapat capaian pada Triwulan I.

17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima:

a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025	Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	93,45	93,45	Pusat Analisis Keparlemenan

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penetapan Pedoman Survei di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	Tim Evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	1	-	-	-	Rp. 0	Telah terlaksana
	Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Implementasi pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terintegrasi pada seluruh unit kerja Eselon II dan dibawahnya	Kuesioner, link, barcode	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penguatan Penyelenggaraan Survei	Aplikasi SKM untuk pengelolaan hasil survei terintegrasi yang dapat di akses perkembangan oleh PIC unit kerja terkait	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Penguatan penyelenggaraan survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Bimbingan teknis penyelenggaraan survei di seluruh layanan Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditetapkannya satuan tugas Survei Kepuasan Masyarakat di setiap unit kerja	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
	Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesetjenan DPR RI	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Penyelenggaraan survei terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Pedoman Penyelenggaraan Survei di lingkungan Kesetjenan DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan,	-	1	1	1	Rp. 155.950.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
	dan berkesinambungan						
Terlaksananya survei kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal DPR RI secara terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan	Rekapitulasi data pengisian kuesioner	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
	Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI	-	1	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Laporan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat reguler sesuai kebutuhan pelaporan kepada Kementerian PANRB maupun irreguler sesuai permintaan unit kerja terkait	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV

Rencana aksi penetapan Pedoman Survei di Setjen DPR yang terintegrasi, khususnya indikator Tim Evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 telah terlaksana. Pada tanggal 20 Januari 2025 telah dibentuk Tim Inti SKM Tahun 2025, dan telah dilaksanakan pertemuan pendahuluan meminta arahan kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemenan (Kapusaka) selaku Wakil Ketua Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 mengenai poin-poin penting dalam penyelenggaraan SKM pada tahun 2025, sebagai landasan penyusunan rencana aksi SKM tahun 2025.

Selain rencana aksi di atas, terdapat beberapa kegiatan yang juga telah dilaksanakan oleh Pusat Analisis Keparlemenan, diantaranya yaitu:

1. Penyusunan Rencana Aksi SKM Tahun 2025

- Tanggal 5 Februari 2025, telah tersusun rencana aksi Penyelenggaraan Survei di Setjen DPR yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkesinambungan;
- Pada tanggal 19 Februari 2025, telah disampaikan rencana aksi SKM Tahun 2025

dalam Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal DPR RI;

2. Reviu Pedoman Penyelenggaraan Survei

- Telah dilaksanakan rapat-rapat reviu draft awal Pedoman Penyelenggaraan SKM Setjen DPR oleh Tim Penyusun Inti;
- Draft Pedoman tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Pusat Analisis Keparlemen untuk mendapat masukan dan arahan;
- Rapat-rapat proses perbaikan dan penyempurnaan telah dilaksanakan.

3. Konfirmasi Kuesioner Survei dan Tindak Lanjut Permintaan Unit Kerja Terkait

- Telah dilaksanakan dan diterima masukan dari Inspektorat I, Inspektorat II, dan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat mengenai permintaan penambahan materi pertanyaan dalam kuesioner survei;
- Masukan dan permintaan sudah ditindaklanjuti dan diinsert dalam Pedoman maupun Googleform yang digunakan;
- Masih menggunakan *barcode* dan link *kuesioner* yang sama dengan tahun lalu untuk seluruh unit kerja Eselon II yang ada.

4. Pengajuan SK Pedoman Penyelenggaraan Survei

- Pada saat ini, sudah tersusun Pedoman Penyelenggaraan SKM Sekretariat Jenderal DPR RI oleh Tim Penyusun Inti;
- Pedoman tersebut selanjutnya telah disampaikan oleh Kepala Pusat Analisis Keparlemen kepada Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi untuk disampaikan kepada Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat;
- Proses pembentukan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Pedoman Penyelenggaraan Survei di Setjen DPR.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/AXT3dcCMjkGX9gm>

b. Indeks Pelayanan Publik

Leading Sector	Capaian 2024	Target 2025		Penanggung Jawab
Kementerian PANRB	4,74	4,74		Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
Penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan	Laporan penetapan	1	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana

penyusunan jadwal pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional	ULE dan jadwal PEKPPP Mandiri Instansional						
Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	Dokumen Surat Tugas/Surat Keputusan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional	1	-	-	-	Rp. 0	Belum terlaksana
Rapat Kerja Persiapan PEKPPP 2025	Laporan Rapat Kerja dan Pembagian Tugas Tim	-	1	-	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup internal Sekretariat Jenderal DPR RI	Laporan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup internal	-	1	1	-	Rp. 21.875.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – III
Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Nasional oleh Kementerian PANRB	Laporan pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik lingkup nasional	-	1	-	-	Rp. 19.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap ULE	Laporan SKM per semester	-	1	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II dan IV
Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Intansional	Laporan PEKPPP Mandiri Intansional	-	-	1	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV
Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	Berita Acara pelaksanaan Forum Konsultasi Puiblik	-	-	1	-	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III

Penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dari hasil FKP dan SKM	Dokumen Rencana Tindak Lanjut	-	-	1	-	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan RTL	Capaian realisasi pelaksanaan RTL	-	-	-	1	Rp. 0	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Mal Pelayanan Publik Online (One Stop Information Service)	Dokumen pengembangan aplikasi MPP Online	-	-	-	1	Rp. 100.000.000	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi penentuan Unit Lokus Evaluasi (ULE) dan penyusunan jadwal pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional, serta rencana aksi pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator PEKPPP Mandiri Instansional belum terlaksana dikarenakan belum adanya instruksi maupun sosialisasi terkait PEKPPP Mandiri Instansional oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB. Rencana aksi akan dilaksanakan ketika Kementerian PANRB telah menyampaikan instruksi maupun sosialisasi terkait PEKPPP Mandiri Instansional.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7q6wZMAW99ZqffY>

LAPORAN PELAKSANAAN RB TEMATIK TRIWULAN I TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan agenda strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam beberapa tahun terakhir, pendekatan pelaksanaan RB telah mengalami penguatan melalui penerapan RB Tematik yang menekankan pada penyelesaian isu-isu prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta pengendalian inflasi. Pendekatan ini menuntut setiap instansi pemerintah, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI, untuk tidak hanya berfokus pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga pada pencapaian hasil konkret dan nyata yang dirasakan oleh publik.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, pelaksanaan RB Tematik dilaksanakan sebagai bagian dari komitmen organisasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional serta mendukung peningkatan kinerja kelembagaan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Implementasi RB Tematik diarahkan untuk memperkuat peran strategis kelembagaan dalam memberikan dukungan administratif dan substantif kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI melalui penguatan proses bisnis, peningkatan kualitas layanan, dan penerapan nilai-nilai integritas serta budaya kinerja.

Pada Triwulan I Tahun 2025, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melaksanakan berbagai kegiatan dan upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan RB Tematik, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan aksi, hingga monitoring ketercapaian target-target tematik. Proses ini melibatkan unit-unit kerja terkait sesuai dengan fokus tematik yang telah ditetapkan, serta dilakukan dengan mengacu pada pedoman dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hingga saat ini *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional maupun *Roadmap* RB terbaru masih dalam tahap penyusunan dan belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PANRB, sehingga pelaksanaan RB Tematik dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan transisional dan fokus prioritas nasional tahun berjalan.

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan RB Tematik menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi implementasi program, mengidentifikasi tantangan dan hambatan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Dengan menyusun laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai progres pelaksanaan RB Tematik pada Triwulan I Tahun 2025 serta menjadi dasar pengambilan kebijakan dan penyempurnaan strategi pelaksanaan RB di Sekretariat Jenderal DPR RI ke depan.

Berikut ini adalah monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB Tematik Sekretariat Jenderal DPR RI beserta capaiannya pada Triwulan I Tahun 2025.

A. PROGRES CAPAIAN SASARAN TEMATIK, DAN INDIKATOR SASARAN TEMATIK TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Pengentasan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, khususnya di sektor ketahanan pangan, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengelolaan serta pemanfaatan data hasil kajian secara optimal. Upaya ini ditunjang oleh pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, guna memastikan bahwa Alat Kelengkapan Dewan (AKD) memiliki akses cepat terhadap informasi yang akurat, terkonsolidasi, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan Keputusan serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengentasan kemiskinan yang ditetapkan Setjen DPR pada tahun 2025 adalah meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan utilisasi sistem dukungan keahlian, persidangan dan administrasi yang terpadu dalam penyediaan informasi hasil pembahasan dan kajian penanggulangan kemiskinan yang terkait ketahanan pangan untuk mendukung AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan oleh mitra kerja.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah unit AKD yang mengakses berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *repository digital* dukungan bidang ketahanan pangan dengan target 4 (empat) AKD yang mengakses; dan
2. Pelaksanaan survei identifikasi pengetahuan dan penggunaan hasil kajian oleh Anggota DPR dengan target terlaksananya survei kepada Anggota DPR RI.

Capaian sasaran dan indikator tema Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Penyusunan Tim Penguatan Analisis tentang Ketahanan Pangan	Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Belum terlaksana
Penyusunan SOP pada pengelolaan <i>repository digital</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Diskusi dengan Pakar terkait ketahanan pangan	Laporan Diskusi	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan

								pada Triwulan II
Inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait ketahanan pangan	Hasil Kajian dan Analisis	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Pembentukan Tim Penyusun NA dan RUU tentang Ketahanan Pangan	Tim	-	1	-	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Penyusunan NA dan draft RUU tentang Ketahanan Pangan	NA dan Draft RUU	-	-	-	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>repository digital</i> tentang ketahanan pangan	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Monitoring pemanfaatan sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pengembangan Kuesioner dan Instrumen Survei	Kuesioner	-	-	1	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan survei	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Evaluasi hasil survei	Laporan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Pelaksanaan rencana aksi Triwulan I belum terlaksana sebagaimana data dukung yang disertakan belum sesuai.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/7ngAoNRZogCC6X7>

2. Peningkatan Investasi

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi diperlukan peningkatan dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian berupa penyediaan data, informasi yang akurat dan terintegrasi berbasis sistem informasi untuk menunjang fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan investasi pada sektor finansial dan sektor riil, dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya peningkatan investasi yang ditetapkan Setjen DPR pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan administrasi, persidangan, dan keahlian yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan kajian dan informasi untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan terkait peningkatan investasi pada sektor finansial dan sektor riil, dari dalam maupun luar negeri.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah AKD yang memanfaatkan berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *repository digital* dukungan bidang peningkatan investasi dengan target 4 (empat) AKD; dan
2. Terlaksananya survei kepuasan dengan target Indeks Kepuasan “3” (skala 0-5).

Capaian sasaran dan indikator tema Peningkatan Investasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	Surat Tugas Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada pengelolaan <i>repository digital</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Penyesuaian teknis pada sistem <i>repository digital</i> sesuai SOP	Sistem	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II

Inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait peningkatan investasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>repository digital</i> terkait peningkatan investasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Monitoring pemanfaatan sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan survei kepuasan layanan <i>repository digital</i>	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pembentukan Tim Pengelola *Repository Digital* telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/193/HK.03/04/2025 pada bulan April 2025. Kemudian rencana aksi penyusunan SOP pada pengelolaan *repository digital* belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana data dukung yang disertakan tidak sesuai dengan indikator *output* yang telah ditetapkan. Pada rencana aksi ditetapkan bahwa indikator *output* yang ditargetkan adalah dokumen SOP, namun data dukung yang disertakan adalah Pedoman Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja untuk Peningkatan Pemahaman Isu Tematik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bzKfmkG3os2RJiH>

3. Pengendalian Inflasi

Dalam rangka mendukung pengendalian inflasi diperlukan peningkatan dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi dalam pengelolaan serta penyimpanan data terintegrasi hasil pembahasan dan kajian terkait pengendalian inflasi, sehingga meningkatkan akses AKD terhadap informasi yang akurat dan terkonsolidasi untuk merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi oleh mitra kerja.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya pengendalian inflasi yang ditetapkan Setjen DPR pada tahun 2025 adalah terselenggaranya dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi yang optimal dan terintegrasi dalam penyediaan dokumen kajian dan informasi terkait pengendalian inflasi untuk mendukung AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan inflasi oleh mitra kerja.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah AKD yang memanfaatkan berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *repository digital* dukungan bidang pengendalian inflasi dengan target 4 (empat) AKD; dan
2. Terlaksananya survei kepuasan dengan target Indeks Kepuasan “3” (skala 0-5).

Capaian sasaran dan indikator tema Pengendalian Inflasi Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Pengelola <i>Repository Digital</i>	SK Tim	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Penyusunan SOP pada pengelolaan <i>repository</i>	Dokumen SOP	1	-	-	-	Rp. 0	Perencanaan	Belum terlaksana
Penyesuaian sistem <i>repository digital</i>	Sistem	-	1	-	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait pengendalian inflasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>repository digital</i> terkait pengendalian inflasi	Jumlah dokumen	-	3	3	2	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Monitoring pemanfaatan sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Pengawasan	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan survei kepuasan layanan <i>repository digital</i>	Survei	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi pembentukan Tim Pengelola *Repository Digital* telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Tugas Nomor: B/193/HK.03/04/2025 pada bulan April 2025. Kemudian rencana aksi penyusunan SOP pada pengelolaan *repository digital* belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana data dukung yang disertakan tidak sesuai dengan indikator *output* yang telah ditetapkan. Pada rencana aksi ditetapkan bahwa indikator *output* yang ditargetkan adalah dokumen SOP, namun data dukung yang disertakan adalah Pedoman Sistem Informasi Forum AKD dan Mitra Kerja untuk Peningkatan Pemahaman Isu Tematik.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/MwXRxwCoFLneryP>

4. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Dalam rangka mendukung upaya digitalisasi administrasi pemerintah, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengembangan dan pengelolaan aplikasi digitalisasi administrasi pemerintah, serta pemanfaatan data hasil kajian secara optimal. Upaya ini ditunjang oleh pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan mudah diakses, guna memastikan bahwa AKD memiliki akses cepat terhadap informasi yang akurat, terkonsolidasi, dan relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan serta pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi. Di samping itu, dalam rangka mendukung upaya digitalisasi administrasi pemerintah, dilakukan peningkatan terhadap dukungan keahlian, persidangan, dan administrasi melalui pengembangan aplikasi digitalisasi.

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan Setjen DPR pada tahun 2025 adalah meningkatkan kapasitas, aksesibilitas dan utilisasi sistem dukungan keahlian, persidangan dan administrasi yang terpadu dalam penyediaan dan informasi hasil pembahasan dan kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendukung AKD dalam merumuskan kebijakan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan digitalisasi administrasi pemerintah oleh mitra kerja. Di samping itu, sasaran lainnya adalah tersedianya aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah untuk mendukung fungsi DPR RI yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Indikator dari sasaran tersebut adalah:

1. Jumlah unit AKD yang mengakses berbagai data dan dokumen risalah serta kajian pada *repository digital* dukungan bidang digitalisasi administrasi pemerintah dengan target 4 (empat) AKD yang mengakses; dan
2. Jumlah aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah dengan target 1 (satu) aplikasi.

Capaian sasaran dan indikator tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Hasil kajian dan analisis	2	2	1	1	Rp. 0	Inovasi	Telah terlaksana
Input data dan dokumen secara berkala pada <i>repository digital</i> tentang digitalisasi administrasi pemerintah	Jumlah dokumen	-	2	1	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II – IV
Monitoring pemanfaatan sistem	Kegiatan	-	-	-	1	Rp. 0	Lain-lain	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Persiapan dan penyusunan untuk mengembangkan aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Dokumentasi	1	-	-	-	Rp.0	Inovasi	Belum terlaksana
Peluncuran dan sosialisasi aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Dokumentasi	-	1	-	-	Rp.0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Monitoring aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Dokumentasi	-	-	1	-	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Evaluasi aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah	Dokumentasi dan laporan	-	-	-	1	Rp. 0	Inovasi	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

Rencana aksi inventarisasi dokumen dan/atau kajian terkait digitalisasi administrasi pemerintah telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Isu Sepekan pada minggu ke-5 Januari (27 Januari s.d. 2 Februari 2025) dengan judul “Kebijakan Sistem Tilang Digital” dan Info Singkat Vol. XVII No. 4/II/PUSAKA/FEBRUARI/2025 dengan judul “Implementasi Coretax Untuk Digitalisasi Perpajakan dan Perwujudan Asta Cita”. Sedangkan rencana aksi penyusunan untuk mengembangkan aplikasi terkait digitalisasi administrasi pemerintah belum terlaksana sebagaimana tidak ada data dukung yang disertakan.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/bG79w5YHnZBj8xR>

5. Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase realisasi transaksi belanja PDN pada 2024 berada di atas 40% dan mengalami peningkatan dibanding 2023, dari 67,64% menjadi 74,97%. Namun, pencapaian tersebut masih di bawah realisasi nasional yang mencapai 90,08%. Selain itu, capaian persentase realisasi transaksi belanja PDN pada akhir 2024 masih di bawah Alokasi PDN dalam RUP sebesar 88,69%. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, sasaran upaya digitalisasi administrasi pemerintah yang ditetapkan Setjen DPR pada tahun 2025 adalah terlaksananya penggunaan anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Indikator dari sasaran tersebut terlaksananya penggunaan anggaran belanja barang/jasa minimal 40% untuk meningkatkan penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Capaian sasaran dan indikator tema Penggunaan Produk Dalam Negeri Sekretariat Jenderal DPR RI pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rencana Aksi	Indikator Output	Target Penyelesaian				Jumlah Anggaran	Fokus Intervensi	Penjelasan Capaian
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Surat Keputusan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana

Pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penginputan RUP Tahun 2025	Laporan	1	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Triwulan I	Persentase penggunaan produk dalam negeri	40 %	-	-	-	Rp. 0	SDM	Telah terlaksana
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Semester I	Persentase penggunaan produk dalam negeri	-	40 %	-	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan II
Monitoring dan Evaluasi Semester I Tahun 2025	Laporan	-	-	1	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% hingga Triwulan III	Persentase penggunaan produk dalam negeri	-	-	40 %	-	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan III
Monitoring dan Evaluasi Semester II Tahun 2025/Ahir Tahun	Laporan	-	-	-	1	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV
Pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri	-	-	-	40 %	Rp. 0	SDM	Rencana Aksi akan dilaksanakan pada Triwulan IV

minimal 40% hingga akhir tahun 2025								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rencana aksi pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Setjen DPR telah dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 316/SEKJEN/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor: 1369/SEKJEN/2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Sekretariat Jenderal DPR RI.

Kemudian rencana aksi pelaksanaan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penginputan RUP Tahun 2025 juga telah terlaksana pada tanggal 8 s.d. 10 Januari 2025 di Ruang Rapat ULP I dan II Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lantai *Basement* Gedung Nusantara III. Selanjutnya rencana aksi pelaksanaan anggaran belanja barang/jasa untuk penggunaan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri minimal 40% pun mulai dilaksanakan secara berkala.

Link eviden: <https://cloud.dpr.go.id/index.php/s/qCTzs55fraDs92s>

LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL PELAKSANAAN RB TAHUN 2025

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Berdasarkan pemaparan dari Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB mengenai *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029, ditegaskan bahwa Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Utama Setjen DPR telah melaksanakan evaluasi RB Tahun 2025 dengan merujuk pada Laporan Hasil Evaluasi RB Setjen DPR Tahun 2024.

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Aksi RB berjalan sesuai rencana serta telah mengakomodasi hasil evaluasi tahun sebelumnya. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan masukan dalam mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan RB, sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan di Setjen DPR.

Evaluasi internal dilakukan dengan menelaah pelaksanaan rencana aksi secara berkelanjutan (*on-going*), guna memperoleh informasi mengenai ketepaan pelaksanaan komponen kegiatan terhadap tujuan yang telah disepakati, pencapaian *output* per triwulan, kualitas manajemen kegiatan, serta kesesuaian waktu pelaksanaan dengan yang tercantum dalam rencana aksi. Evaluasi ini juga mencakup pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi dari evaluasi sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi internal tidak hanya menilai ketercapaian *output* dan kualitas rencana aksi, tetapi juga melibatkan Bagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi (PKORB) sebagai unit yang berperan dalam pengelolaan RB di Setjen DPR. Evaluator internal juga melakukan konfirmasi langsung kepada unit kerja penanggung jawab (PIC) guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait pelaksanaan Evaluasi RB.

Sesuai dengan evaluasi yang telah dilaksanakan dan disampaikan oleh Inspektorat Utama melalui Surat Nomor: 545/PI.03/07/2024 pada tanggal 2 Juli 2025, Hasil Evaluasi Internal *On-Going* RB Sekretariat Jenderal DPR RI Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

A. HASIL EVALUASI INTERNAL ON-GOING TRIWULAN I TAHUN 2025

I. EVALUASI RB GENERAL

NO	INDIKATOR RB	REKOMENDASI LHE RB MENPAN TAHUN 2024	CATATAN
1.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Perlu dilakukan kembali penyederhanaan birokrasi setidaknya sampai level 80%	Rencana aksi sudah menggambarkan penyederhanaan birokrasi, namun belum tergambar penyederhanaan

			birokrasi setidaknya sampai level 80%
2.	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	Segera melakukan perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan/atau penyesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP)	Rencana aksi belum sesuai dengan rekomendasi RB Tahun 2024, karena pada rencana aksi belum menjelaskan mengenai perbaikan dan pengembangan proses bisnis dan SOP Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3.	Indeks SPBE	<p>Rekomendasi terdapat dalam LHE masing-masing instansi. Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Sekretariat Jenderal DPR RI, sudah dapat menggambarkan predikat MEMUASKAN dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.</p> <p>Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pada aspek Penerapan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan SPBE, Penerapan Manajemen</p>	<p>Rencana aksi masih perlu menambahkan kegiatan evaluasi dan review secara periodik pada nilai Tingkat Kematangan Indikator yang skornya masih 3 ke bawah, yaitu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE (3); 2. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (2); 3. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan (3); 4. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (3); 5. Tingkat Kematangan Pelaksanaan

		<p>SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Namun di sisi lain, Sekretariat Jenderal DPR RI masih perlu meningkatkan pada Aspek Audit TIK yaitu pada Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, semua pelaksanaan Audit masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan Audit oleh Auditor Eksternal sesuai dengan pedoman yang berlaku.</p> <p>Pada aspek yang masih memiliki Tingkat Kematangan 3, perlu dilakukan evaluasi dan review secara periodik. Sedangkan bagi indikator yang sudah mencapai Tingkat Kematangan 4, perlu segera dilakukan tindak lanjut sesuai hasil review. Sedangkan pada aspek Audit, penyelenggaraan semua audit perlu dilakukan dengan mengacu pada pedoman yang berlaku. Aspek lainnya perlu dipertahankan dengan terus senantiasa melakukan evaluasi dan review, juga melakukan inovasi lanjutan dari praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan.</p>	<p>Audit Aplikasi SPBE (3);</p> <p>6. Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (3);</p> <p>7. Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (3)</p>
4.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Instansi perlu melakukan Perencanaan dan Penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE dengan menerapkan mekanisme	Rencana aksi belum sesuai dengan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024 karena belum menggambarkan

		Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi	penerapan mekanisme Evaluasi/Clearance Belanja SPBE di instansi
5.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<p>Meningkatkan Pengendalian Intern atas dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mengupayakan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang mendukung persidangan DPR RI sesuai analisis beban kerja; b) Mengupayakan integrasi dan evaluasi berkala atas sistem informasi yang digunakan dalam mendukung kegiatan persidangan, termasuk mekanisme mentransmisikan data antar sistem informasi, menyusun prosedur dalam penyiapan laporan yang efisien, dan menyiapkan staf yang memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan sistem informasi tersebut; c) Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian yang menjadi acuan dalam realisasi dan pertanggungjawaban belanja konsumsi rapat secara efektif dan efisien; d) Menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme penyerahan bekas pertanggungjawaban 	<p>Untuk Rekomendasi 1: Meningkatkan Pengendalian Intern atas dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi DPR RI (Poin a s.d. e) belum terdapat pada rencana aksi SPIP tahun 2025.</p> <p>Untuk Rekomendasi 2: Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja telah dimasukkan ke dalam rencana aksi “penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya dan memperbaiki indikator sasaran yang belum relevan dalam mencapai sasaran”.</p> <p>Namun dalam rencana aksi tersebut, belum spesifik mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Menyesuaikan indikator sasaran strategis “Tingkat Kapabilitas APIP” untuk berada di

	<p>perjalanan dinas dalam dan luar negeri;</p> <p>e) Menginstruksikan Kepala Bagian Administrasi BMN untuk menginventarisasi Aset Tak Berwujud yang sudah tidak aktif digunakan dan menjaga ketepatan penyajian klasifikasinya.</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja dengan:</p> <p>a) Menyesuaikan indikator sasaran strategis "Tingkat Kapabilitas APIP" untuk berada di level program dan kegiatan Inspektorat Utama;</p> <p>b) Menyesuaikan Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk berada di unit kerja manajemen Sekretariat Jenderal di DPR RI;</p> <p>c) Menetapkan target kinerja indikator Sasaran Program dengan memperhatikan capaian/realisasi tahun sebelumnya.</p> <p>Menyempurnakan kualitas manajemen risiko di seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dengan:</p> <p>a) Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI;</p>	<p>level program dan kegiatan Inspektorat Utama;</p> <p>b) Menyesuaikan Sasaran Program "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk berada di unit kerja manajemen Sekretariat Jenderal DPR RI;</p> <p>c) Menetapkan target kinerja indikator Sasaran Program dengan memperhatikan capaian/realisasi tahun sebelumnya.</p> <p>Untuk Rekomendasi 3: kualitas manajemen risiko di seluruh unit kerja Sekretariat Jenderal DPR RI, yang telah dilaksanakan adalah poin A s.d. D. Namun untuk poin E (Menginstruksikan APIP untuk melakukan evaluasi berkala atas kebijakan, <i>framework</i>, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko) belum tergambar di</p>
--	---	--

		<p>b) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh unit kerja dan pengambilan keputusan oleh manajemen;</p> <p>c) Menyesuaikan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Sekretariat Jenderal DPR RI dengan kebijakan integrasi manajemen risiko pada proses manajemen unit kerja dan pertimbangan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan;</p> <p>d) Menyempurnakan sistem informasi manajemen risiko instansi dengan menambahkan pihak yang terdampak dari setiap uraian risiko dan tren risiko yang muncul di setiap unit kerja;</p> <p>e) Menginstrusikan APIP untuk melakukan evaluasi berkala atas kebijakan, <i>framework</i>, metode, tahapan, proses, dan praktik yang dijalankan terkait dengan proses manajemen risiko</p>	rencana aksi SPIP tahun 2025
6.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	(Tidak ada rekomendasi)	-
7.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi	(Tidak ada rekomendasi)	-

8.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja	(Tidak ada rekomendasi)	-	
9.	Indeks Reformasi Hukum	(Dipertahankan)	-	
10.	SAKIP	Catatan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP dapat diakses pada esr.menpan.go.id dengan menggunakan akun instansi	Tidak terdapat data di website tersebut. Berdasarkan LHE AKIP dari Kementerian PANRB Tahun 2024 didapatkan 1 (satu) rekomendasi yang belum terlihat pada rencana aksi yang telah disusun, yaitu: Penyusunan Penjenjangan Kinerja telah terdapat dalam dokumen rencana aksi, namun belum mengakomodir identifikasi <i>Critical Success Factor</i> (CSF) dalam pernyataan rencana aksi penjenjangan kinerja	
11.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<p>1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan, program/kegiatan pada K/L;</p> <p>2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dengan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;</p>	Rencana aksi tahun 2025 sebagian telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Rencana aksi yang disusun masih belum menggambarkan rekomendasi terkait:	<p>1. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percetakan lelang dan</p>

		<p>3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun;</p> <p>4. Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan;</p> <p>5. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai;</p> <p>6. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan;</p> <p>7. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran;</p> <p>8. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian <i>output</i> untuk setiap RO yang dikelola, khususnya <i>output</i> teknis.</p>	<p>penandatanganan kontrak setelah DIPA ditetapkan;</p> <p>2. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan;</p> <p>3. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana dengan memperhatikan batas-batas akhir penyampaian SPM pada akhir tahun anggaran;</p> <p>4. Menetapkan target dan metode perhitungan capaian <i>output</i> untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk <i>output</i> teknis</p>
12.	Indeks Pengelolaan Aset	<p>1. Dalam upaya peningkatan indeks pada parameter Realisasi PNPB dari Pengelolaan BMN, beberapa hal yang dapat diakukan oleh K/L adalah:</p>	Rencana aksi tahun 2025 telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024, namun terkait rekomendasi tindak

	<p>a) Peningkatan PNBP melalui pemanfaatan BMN (terhadap BMN yang sedang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi K/L);</p> <p>b) Perbaikan target/estimasi PNBP dari pengelolaan BMN yang disampaikan kepada DJA;</p> <p>c) Optimalisasi penggunaan BMN dalam rangka peningkatan persentase kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK; serta</p> <p>d) Tindak lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang.</p> <p>2. Di samping itu, dalam upaya peningkatan indeks pada subparameter Realisasi PNBP dari Pemanfaatan BMN berdasarkan Persetujuan Pengelola Barang, K/L diharapkan melakukan beberapa hal berikut:</p> <p>a) Penerbitan upaya pemanfaatan BMN dengan pengajuan persetujuan pemanfaatan kepada Pengelola Barang; dan</p> <p>b) Perekaman tindak lanjut persetujuan pemanfaatan dan</p>	<p>lanjut atas BMN yang masuk kategori rusak berat dalam hal BMN dapat dipindahtangankan melalui mekanisme penjualan secara lelang perlu menyesuaikan rencana aksi yang menggambarkan kegiatan monitoring dan tindak lanjutnya</p>
--	--	--

		perekaman PNBP pemanfaatan yang disetorkan ke kas negara pada aplikasi SIMAN	
13.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	(Tidak ada rekomendasi)	-
14.	Indeks Sistem Merit	(Tidak ada rekomendasi)	-
15.	Indeks BerAKHLAK	Laporan lengkap dapat diunduh pada website evalbudker.menpan.go.id dengan <i>username</i> dan <i>password</i> yang sama sewaktu pengisian evaluasi budaya kerja	-
16.	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Indeks Pembangunan Statistik	<p>1. Sekretariat Jenderal DPR RI perlu untuk menyusun prosedur baku (SOP) yang lebih rinci terkait aspek pemeriksaan dan proses melakukan pengolahan data, khususnya untuk Indikator Pengolahan Data;</p> <p>2. Pembahasan pada rapat evaluasi perlu memperjelas bagian yang dievaluasi, kondisi sebelum dievaluasi, solusi dari hasil evaluasi, dan tindak lanjut evaluasi;</p> <p>3. Perlu adanya dokumen kebijakan mengenai formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer beserta tugas-tugasnya.</p>	<p>Rencana aksi tahun 2025 sebagian telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024. Rencana aksi yang disusun masih belum menggambarkan rekomendasi terkait:</p> <p>1. Sekretariat Jenderal DPR RI perlu untuk menyusun prosedur baku (SOP) yang lebih rinci terkait aspek pemeriksaan dan proses melakukan pengolahan data, khususnya untuk Indikator Pengolahan Data;</p> <p>2. Perlu adanya dokumen kebijakan mengenai formasi/kebutuhan Jabatan Fungsional Statistisi dan Jabatan</p>

			Fungsional Pranata Komputer beserta tugas- tugasnya
17.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>Setelah mengetahui analisis terkait faktor koreksi pada subbab sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat melakukan analisis mendalam mengenai perumusan rekomendasi dan rencana aksi untuk menindaklanjuti hasil SPI 2024. Pada SPI 2024, Sekretariat Jenderal DPR RI mendapat skor SPI sebesar 77,15. Indeks tersebut menempatkan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam kategori waspada yang berarti praktik korupsi masih terjadi berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal, maupun ekspert. Situasi ini bisa terjadi akibat dari sistem pencegahan anti-korupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang belum berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga. Oleh karena itu, Sekretariat Jenderal DPR RI perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level integritas di kalangan penjabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan antikorupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi, lembaga yang bersifat</p>	Dalam dokumen Rencana Aksi RB untuk Indikator SPI KPK telah tercantum kegiatan “Pelaksanaan Rencana Aksi dan/atau Monitoring dan Evaluasi SPI KPK Tahun 2025”. Namun, perumusannya masih bersifat umum sehingga tidak memungkinkan untuk memantau sejauh mana pelaksanaannya. Oleh karena itu, rencana aksi sebaiknya dijabarkan secara lebih rinci, selain itu rencana aksi RB untuk Indikator SPI KPK dapat diselaraskan dengan rencana aksi SPI yang disampaikan kepada KPK

		kontekstual serta strategi mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif, ada beberapa rekomendasi langkah dan tahapan yang dapat dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI	
18.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	(Tidak ada rekomendasi)	-
19.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Seluruh unit pengolah harus melakukan pemberkasan terhadap seluruh arsip/naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar yang tercipta pada SRIKANDI	Rencana aksi tahun 2025 telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 melalui kegiatan "Penataan Arsip"
20.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	<p>1. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pengumuman RUP SIRUP;</p> <p>2. Tingkatkan dan pertahankan kinerja realisasi paket tender;</p> <p>3. Tingkatkan dan pertahankan kinerja penyelesaian paket katalog elektronik;</p> <p>4. Realisasi minimal 1 (satu) paket melalui toko daring;</p> <p>5. Perlu ada kolaborasi dan sinergi untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP;</p> <p>6. Tingkatkan dan pertahankan kinerja pencatatan e-kontrak;</p> <p>7. Melakukan penghitungan kebutuhan formasi kembali untuk memastikan jumlah kebutuhan yang tepat;</p>	<p>Rencana aksi tahun 2025 telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024, namun masih terdapat catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Telah terdapat kegiatan untuk memenuhi JF PPBJ yang belum 100% melalui kegiatan proses rekrutmen CPNS 2025 untuk posisi JF PPBJ Ahli Pertama;</p> <p>2. Belum terdapat kegiatan yang menggambarkan bahwa pada tahun 2025 akan dilaksanakan transaksi melalui toko daring;</p>

		<p>8. Implementasi dengan baik pencapaian tersebut.</p> <p>Selanjutnya persiapan menuju tingkatan berikutnya</p>	<p>3. Belum terdapat kegiatan yang menggambarkan akan dilaksanakan kolaborasi dan kinerja untuk merealisasikan paket non-tender/non e-purchasing sesuai RUP</p>
21.	Indeks Pelayanan Publik	(Tidak ada rekomendasi)	-
22.	Indeks Perancangan Pembangunan	<p>Rekomendasi untuk aspek</p> <p>1.b.1: Mengoptimalkan koordinasi K/L dengan Mitra K/L agar keselarasan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Rencana Kerja dengan Rencana Strategis K/L seluruhnya mencapai nilai 100% konsisten/terintegrasi;</p> <p>2.b.1: Memastikan Total Pagu Anggaran pada RKA KL untuk setiap nomenklatur sinkron dengan total Pagu Anggaran pada Rencana Kerja K/L untuk nomenklatur yang bersangkutan dengan mengalokasikan anggaran yang sudah terdapat pada setiap nomenklatur di Rencana Kerja K/L mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai di RKA KL</p>	<p>Rencana aksi tahun 2025 telah disusun berdasarkan Rekomendasi Hasil Evaluasi RB Tahun 2024 melalui kegiatan:</p> <p>1. Pelaksanaan Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Strategis dengan Rencana Kerja;</p> <p>2. Pelaksanaan Sinkronisasi/ Penyelarasan Rencana Kerja dengan RKA KL TA 2025</p>

II. EVALUASI RB TEMATIK

NO	INDIKATOR RB	REKOMENDASI LHE RB MENPAN TAHUN 2024	CATATAN
1.	Digitalisasi Administrasi Pemerintah	<p>1. Memastikan rencana aksi yang disusun pada tema “digitalisasi administrasi pemerintahan pada penanganan <i>stunting</i>” memuat unsur penanganan <i>stunting</i>;</p> <p>2. Memastikan intervensi berupa rencana aksi memahami sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi, informasi, dan inovasi</p>	<p>Rencana aksi 2025 belum memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur penanganan <i>stunting</i>; 2. SOP; 3. Teknologi informasi; 4. Inovasi
2.	Inflasi	Memastikan intervensi berupa rencana aksi memahami sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi, informasi, dan inovasi	<p>Rencana aksi 2025 belum memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP; 2. Teknologi informasi; 3. Inovasi
3.	Investasi	Memastikan intervensi berupa rencana aksi	Rencana aksi 2025 belum

		memahami sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi, informasi, dan inovasi	memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut: 1. SOP; 2. Teknologi informasi; 3. Inovasi
4.	Peningkatan PDN (Penggunaan Produk Dalam Negeri)	Terus meningkatkan kualitas rencana aksi PDN	Rencana aksi 2025 belum memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut: 1. SOP; 2. Teknologi informasi; 3. Inovasi
5.	Kemiskinan	Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi	Rencana aksi 2025 belum memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu Intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian

		<p>Memastikan intervensi berupa rencana aksi memahami sebagian besar dari aspek perencanaan dan penganggaran, proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sumber Daya Manusia (SDM), pengawasan, teknologi, informasi, dan inovasi</p>	<p>rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP; 2. Teknologi informasi; 3. Inovasi
--	--	--	--

Kemudian, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB dibandingkan dengan rencana aksi yang telah disusun, terdapat beberapa catatan dan rekomendasi dengan rincian sebagai berikut:

A. CATATAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA AKSI RB

- 1) Ketercapaian target-target rencana aksi (satuan dan indikator *output*) sebagai berikut:
 - a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Nilai SAKIP;
 - ii. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
 - iii. Survei Penilaian Integritas;
 - iv. Indeks Reformasi Hukum;
 - v. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - vi. Indeks Pembangunan Statistik;
 - vii. Indeks Perencanaan Pembangunan.
 - b) Sebagian besar pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - ii. Indeks SPBE;
 - iii. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - iv. Skor Maturitas SPIP;
 - v. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
 - vi. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi;
 - vii. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - viii. Indeks Pengelolaan Aset;
 - ix. Opini BPK;
 - x. Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip;
 - xi. Indeks Tata Kelola Pengadaan.
 - c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah tercapai *output*-nya pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Indeks Pelayanan Publik.

- 2) Ketercapaian target-target rencana aksi (waktu) sebagai berikut:
- a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - ii. Indeks SPBE;
 - iii. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - iv. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
 - v. Nilai SAKIP;
 - vi. Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI;
 - vii. Indeks Reformasi Hukum;
 - viii. Survei Penilaian Integritas;
 - ix. Indeks Pembangunan Statistik;
 - x. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - xi. Indeks Perencanaan Pembangunan.
 - b) Sebagian besar pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Skor Maturitas SPIP;
 - ii. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi;
 - iii. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - iv. Indeks Pengelolaan Aset;
 - v. Opini BPK;
 - vi. Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip;
 - vii. Indeks Tata Kelola Pengadaan.
 - c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang dilaksanakan tepat waktu pada Triwulan I dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Indeks Pelayanan Publik.
- 3) Kualitas kegiatan terhadap ekspektasi rencana aksi RB dan kualitas manajemen dalam pelaksanaan RB sebagai berikut:
- a) Seluruh pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output*, dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Indeks Perencanaan Pembangunan;
 - ii. Indeks Pembangunan Statistik.
 - b) Sebagian pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output* dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi;
 - ii. Indeks SPBE;
 - iii. Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - iv. Skor Maturitas SPIP;
 - v. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N LAPOR);
 - vi. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI yang terintegrasi;

- vii. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 - viii. Indeks Pengelolaan Aset;
 - ix. Opini BPK;
 - x. Survei Penilaian Integritas;
 - xi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - xii. Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip;
 - xiii. Indeks Tata Kelola Pengadaan.
- c) Belum terdapat pelaksanaan aksi berdasarkan rencana aksi yang telah dilengkapi dengan data dukung yang sesuai dengan indikator *output* dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Indeks Pelayanan Publik
 - d) Pelaksanaan seluruh aksi di triwulan selanjutnya (tidak terdapat aksi di Triwulan I):
 - i. Tingkat Capaian Sistem Kerja ASN;
 - ii. Indeks Sistem Merit;
 - iii. Indeks BerAKHLAK.

B. EVALUASI RB ON-GOING TEMATIK TRIWULAN I

Terdapat 5 (lima) indikator utama dalam pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) *On-Going* Tematik, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Realisasi Investasi, Digitalisasi Pemerintahan, Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), dan Pengendalian Inflasi. Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa rencana aksi 2025 belum memperhatikan rekomendasi LHE RB Kementerian PANRB Tahun 2024. Rincian penjelasannya, yaitu intervensi belum mencakup sebagian besar (80-100%) dari keseluruhan rincian rekomendasi, dengan rincian yang belum dipenuhi sebagai berikut:

1. SOP;
2. Teknologi informasi;
3. Inovasi.

Setiap aksi menunjukkan pencapaian target rencana aksi dan *output* sesuai waktu yang ditetapkan. Dari segi kualitas kegiatan terhadap ekspektasi rencana aksi RB, bukti dukung menunjukkan bahwa kegiatan telah menghasilkan *output* yang jelas dan selaras dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Dari sisi kualitas manajemen pelaksanaan, bukti dukung yang disajikan relevan dengan pencapaian tujuan dan menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan RB *On-Going* Tematik telah berjalan sesuai harapan.

Secara keseluruhan, kelima aksi tersebut berhasil dilaksanakan sesuai target dan ekspektasi, baik dari segi kualitas kegiatan maupun manajemen pelaksanaannya di Triwulan I.

C. KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (*OUTPUT DAN WAKTU*)

NO	AKSI	CATATAN (<i>OUTPUT</i>)	CATATAN (<i>WAKTU</i>)
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Terdapat 1 dari 2 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 1 dari 2 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Terdapat 1 dari 3 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 1 dari 3 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	Terdapat 1 dari 4 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 1 dari 4 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat:	Terdapat 1 dari 2 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 1 dari 2 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I

	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)		
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Terdapat 3 dari 18 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 3 dari 18 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Terdapat 1 dari 4 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 1 dari 4 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Terdapat 1 dari 8 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, dengan catatan belum terlampir Laporan Capaian Output	Terdapat 1 dari 8 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, yaitu indikator "Tersedianya Laporan Capaian Output"
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	Terdapat 3 dari 10 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, dengan catatan:	Terdapat 3 dari 10 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, yaitu indikator: 1. Laporan RKBMN T+2;

		<p>1. Belum terlampir Laporan Pengawasan dan Pengendalian;</p> <p>2. Belum terlampir Laporan RKBMN;</p> <p>3. Belum terlampir Laporan Kegiatan Paket <i>Meeting</i> tanggal 13-14 Maret 2025</p>	<p>2. Laporan Pengawasan dan Pengendalian;</p> <p>3. Kegiatan Bimtek/Workshop/Paket <i>Meeting</i> terkait Pengelolaan BMN</p>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Terdapat 1 dari 5 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, dengan catatan belum terlampir data dukung terkait Laporan Keuangan Eksternal	Terdapat 1 dari 5 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I, yaitu indikator “Tersusunnya Laporan Keuangan dengan tepat waktu” pada rencana aksi “Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal”
16.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
17.	Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh indikator telah tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Seluruh indikator <i>output</i> belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh indikator <i>output</i> belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Seluruh indikator <i>output</i> belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Seluruh indikator <i>output</i> belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Terdapat 2 dari 3 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I	Terdapat 2 dari 3 indikator <i>output</i> yang belum tercapai <i>output</i> aksinya pada Triwulan I

22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh indikator telah tercapai output aksinya pada Triwulan I	Seluruh aksi telah dilaksanakan pada Triwulan I
-----	--------------------------------	---	---

D. KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Berdasarkan rencana aksi “Tingkat Implementasi Penyederhanaan Struktur Organisasi” di Triwulan I tidak menggunakan anggaran dalam pelaksanaan aksinya, namun berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi terdapat pengalokasian anggaran yang digunakan pada Triwulan I sebesar Rp. 28.710.000 atau realisasi sebesar 33,95%. Sehingga, tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Rencana aksi “Penyusunan arsitektur domain proses bisnis berbasis BPMN”, dengan rencana output “Tersusunnya peta proses bisnis berbasis BPMN”, namun eviden yang dilampirkan berupa “Laporan singkat Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE tanggal 19 Februari 2025. Sehingga belum tergambar matriks/kertas kerja rencana aksi yang menjelaskan peta proses bisnis berbasis BPMNnya; 2. Rencana aksi “Penerapan manajemen perubahan pada layanan TIK”, dengan indikator “laporan” dan output “Pengembangan aplikasi penerapan manajemen perubahan layanan TIK” telah sesuai dengan adanya form permohonan perubahan fitur rating pada aplikasi STELA pada 26 Februari 2025 dan Laporan Pengembangan STELA tanggal 10 Maret 2025;

		<p>3. Rencana aksi “Penerapan audit TIK dan audit keamanan eksternal” dengan indikator <i>output</i> “laporan” dan indikator <i>output</i> “Terkelaksananya Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal”, namun eviden yang dilampirkan berupa “Laporan singkat Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE tanggal 19 Februari 2025”. Sehingga, belum tergambar pelaksanaan audit TIK dan audit keamanan eksternal, terutama dalam tindak lanjut hasil audit TIK dalam (internal)</p>
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan I telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan I telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana aksi “Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran” dengan target indikator “Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK” telah dilaksanakan dengan Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025. Namun, kegiatan tersebut belum dapat menggambarkan hasil “Penyesuaian dokumen PK dengan penetapan target yang disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran”. Sehingga diharapkan dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan (cq. Bagian PKORB) terkait perubahan PK pada Eselon I dan II di Sekretaris Jenderal DPR RI (dapat melampirkan laporan singkat koordinasi evaluasi PK dengan Bagian PKORB, serta PK Tahun 2025 yang telah disesuaikan);</p>

		<p>2. Rencana aksi “Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretaris Jenderal DPR RI” dengan target indikator “<i>Risk Register</i>, Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i>, dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko”. Namun, <i>output</i> yang diberikan belum dapat menggambarkan pelaksanaan evaluasi <i>risk register</i> di Sekretaris Jenderal DPR RI karena evaluasi yang dilaksanakan baru dilaksanakan di Deputi Persidangan, Badan Keialian dan jajaran di bawahnya. Kemudian, belum diberikan penjelasan mengenai <i>risk residual</i> yang terdapat di Sekretaris Jenderal DPR RI. Serta <i>Risk Register</i> Tahun 2025 yang dilampirkan masih dalam bentuk Excel (belum formal/tanda tangan oleh pimpinan unit kerja);</p> <p>3. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I di Laporan Progres</p>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I, untuk rencana aksi “FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat”, dengan realisasi <i>output</i> berupa “Diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Aplikasi SP4N LAPOR” dilaksanakan tanggal 14 Februari 2025;</p> <p>2. Untuk rencana aksi “FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat”, dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa “Diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Aplikasi SP4N LAPOR” belum tergambar bagaimana tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan (agar dilampirkan dalam bentuk matriks/rencana aksi tindak lanjut), serta belum adanya laporan singkat kegiatan tersebut sehingga belum terlihat alur dari tindak lanjut pengaduan masyarakatnya seperti apa</p>

8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Data dukung yang dilampirkan, yaitu Laporan Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas WBK/WBBM (Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Zona Integritas) di lingkup tugas pengawasan intern Inspektorat II dinilai telah mampu menjawab rencana aksi atas kegiatan pendampingan. Namun, kegiatan monitoring dan evaluasi triwulanan belum tergambar dalam laporan; 2. Data dukung yang dilampirkan, yaitu Laporan Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dinilai telah mampu menjawab rencana aksi atas kegiatan penyusunan rencana aksi. Namun, dalam laporan belum mencerminkan bahwa rencana aksi telah dilaksanakan
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan I telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: Data dukung yang dilampirkan belum dapat menjawab rencana aksi sepenuhnya atas kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK karena hanya menunjukkan adanya kegiatan <i>entry meeting</i> pemeriksaan BPK RI
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Belum terdapat data dukung terkait Pemeliharaan Mesin Cacah; 2. Belum terdapat data dukung terkait Sewa Ruang Arsip Tiga; 3. Belum terdapat data dukung terkait Penataan Arsip Barang/Jasa
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: Data dukung yang dilampirkan belum dapat menjawab rencana aksi sepenuhnya karena

		belum terdapat data dukung terkait adanya forum koordinasi konsultasi dengan mitra
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Pemutakhiraan RPD", data dukung yang dilampirkan berupa draft RPD Triwulan I dalam bentuk Excel dan belum ditandatangani; 2. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran", data dukung yang dilampirkan berupa file dokumen indikator penyerapan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani; 3. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Penyelesaian Tagihan", data dukung yang dilampirkan berupa file dokumen data indikator penyelesaian tagihan, belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani; 4. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Capaian Output", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada indikator <i>output</i> "Laporan RKBMN T+2", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi; 2. Pada indikator <i>output</i> "Laporan Pengawasan dan Pengendalian", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi; 3. Pada indikator <i>output</i> "Kegiatan Bimtek/Workshop/Paket Meeting terkait pengelolaan BMN", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada indikator <i>output</i> "Tersusunnya Laporan Keuangan dengan tepat waktu" rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal", belum terlampir data dukungnya, sehingga

		belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
16.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
17.	Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan I telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Telah terdapat penjelasan pelaksanaan aksi di Triwulan I dalam Laporan Progress SKM Triwulan I, namun terkait dengan target indikator <i>output</i> “Terbentuknya Tim Evaluasi Pedoman Penyelenggaran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Kementerian PANRB Nomor 14 Tahun 2017” belum sesuai, karena di Laporan Progress yang dilampirkan merupakan Surat Tugas tahun 2024 dan tidak dilampirkannya eviden Surat Tugas tahun 2025 di folder eviden Triwulan I
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Belum terdapat data dukung yang menggambarkan Penentuan ULE dan penyesuaian jadwal pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional; 2. Belum terdapat data dukung terkait Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator Mandiri Instansional; 3. Belum terdapat data dukung terkait progress pengembangan aplikasi Mal Pelayanan Publik Online (<i>One Stop Information Service</i>)
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Rencana Aksi “Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI” dan rencana aksi “Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027” menggunakan pelaksanaan rapat reviu RITIK oleh Kementerian PANRB dan pakar pada tanggal 25 Februari 2025 di Sheraton Grand Jakarta. Namun, belum menggambarkan bagaimana

		<p>penyusunan kebijakan internal arsitektur SPBE DPR RI dan Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027;</p> <p>2. Rencana aksi “Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi” menggunakan rapat koordinasi terkait domain kualitas data dan evaluasi SOP Kualitas Penjaminan Data bersama BPS tanggal 10 Maret 2025. Namun, belum tergambar Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi yang dimaksud;</p> <p>3. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I</p>
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Seluruh indikator yang ditargetkan pada Triwulan I telah sesuai pelaksanaan komponen aksinya

E. KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Berdasarkan rencana aksi “Tingkat Implementasi Penyederhanan Struktur Organisasi” di Triwulan I tidak menggunakan anggaran dalam pelaksanaan aksinya, namun berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi terdapat pengalokasian anggaran yang digunakan pada Triwulan I sebesar Rp. 28.710.000 atau realisasi sebesar 33,95%. Sehingga, tidak sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:

- Rencana aksi “Penyusunan arsitektur domain proses bisnis berbasis BPMN”, dengan rencana *output* “Tersusunnya peta proses bisnis berbasis BPMN”, namun eviden yang dilampirkan berupa “Laporan singkat Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE tanggal 19 Februari 2025. Sehingga belum tergambar matriks/kertas kerja rencana aksi yang

		<p>menjelaskan peta proses bisnis berbasis BPMNnya;</p> <p>2. Rencana aksi “Penerapan manajemen perubahan pada layanan TIK”, dengan indikator “laporan” dan <i>output</i> “Pengembangan aplikasi penerapan manajemen perubahan layanan TIK” telah sesuai dengan adanya <i>form</i> permohonan perubahan fitur <i>rating</i> pada aplikasi STELA pada 26 Februari 2025 dan Laporan Pengembangan STELA tanggal 10 Maret 2025;</p> <p>3. Rencana aksi “Penerapan audit TIK dan audit keamanan eksternal” dengan indikator <i>output</i> “laporan” dan indikator <i>output</i> “Terlaksananya Audit TIK dan Audit Keamanan Eksternal”, namun eviden yang dilampirkan berupa “Laporan singkat Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE tanggal 19 Februari 2025”. Sehingga, belum tergambar pelaksanaan audit TIK dan audit keamanan eksternal, terutama dalam tindak lanjut hasil audit TIK dalam (internal)</p>
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana aksi “Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran” dengan target indikator “Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK” telah dilaksanakan dengan Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025. Namun, kegiatan tersebut belum dapat menggambarkan hasil “Penyesuaian dokumen PK dengan penetapan target yang</p>

		<p>disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran”. Sehingga, diharapkan dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan (cq. Bagian PKORB) terkait perubahan PK pada Eselon I dan II di Sekretaris Jenderal DPR RI (dapat melampirkan laporan singkat koordinasi evaluasi PK dengan Bagian PKORB, serta PK Tahun 2025 yang telah disesuaikan);</p> <p>2. Rencana aksi “Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretaris Jenderal DPR RI” dengan target indikator “<i>Risk Register</i>, Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i>, dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko”. Namun, <i>output</i> yang diberikan belum dapat menggambarkan pelaksanaan evaluasi <i>risk register</i> di Sekretaris Jenderal DPR RI karena evaluasi yang dilaksanakan baru dilaksanakan di Deputi Persidangan, Badan Kelembagaan dan jajaran di bawahnya. Kemudian, belum diberikan penjelasan mengenai <i>risk residual</i> yang terdapat di Sekretaris Jenderal DPR RI. Serta <i>Risk Register</i> Tahun 2025 yang dilampirkan masih dalam bentuk Excel (belum formal/tanda tangan oleh pimpinan unit kerja);</p> <p>3. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I di Laporan Progres</p>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <p>1. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I, untuk rencana aksi “FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat”, dengan realisasi <i>output</i> berupa “Diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Aplikasi SP4N LAPOR” dilaksanakan tanggal 14 Februari 2025;</p> <p>2. Untuk rencana aksi “FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat”, dengan kegiatan yang dilaksanakan berupa “Diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang</p>

		ditujukan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Aplikasi SP4N LAPOR” belum tergambar bagaimana tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan (agar dilampirkan dalam bentuk matriks/rencana aksi tindak lanjut), serta belum adanya laporan singkat kegiatan tersebut, sehingga belum terlihat alur dari tindak lanjut pengaduan masyarakatnya seperti apa
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dukung yang dilampirkan, yaitu Laporan Pendampingan Pembangunan Unit Zona Integritas WBK/WBBM (Penyusunan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi Zona Integritas) di lingkup tugas pengawasan intern Inspektorat II dinilai telah mampu menjawab rencana aksi atas kegiatan pendampingan. Namun, kegiatan monitoring dan evaluasi triwulan belum tergambar dalam laporan; 2. Data dukung yang dilampirkan, yaitu Laporan Penyusunan Rencana Aksi atas Hasil SPI KPK Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024, dinilai telah mampu menjawab rencana aksi atas kegiatan penyusunan rencana aksi. Namun, dalam laporan belum mencerminkan bahwa rencana aksi telah dilaksanakan
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	<p>Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung yang belum ditandatangani dengan catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada indikator <i>output</i> “Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Polhukham (FGD/Workshop/Seminar)” data dukung yang dilampirkan salah satunya berupa Dokumen Prosiding Webinar Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana dan belum ditandatangani pejabat yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen tersebut belum dapat dibuktikan; 2. Pada indikator <i>output</i> “Terselenggaranya pelatihan peningkatan kompetensi pada Pusat

		Perancangan Undang-Undang Bidang Ekkuinbang Kesra (FGD/Workshop/Seminar) data dukung yang dilampirkan salah satunya berupa Dokumen Prosiding FGD Evaluasi dan Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Sinergitas Sistem Pendidikan Nasional dan belum ditandatangani pejabat yang berwenang, sehingga keabsahan dokumen tersebut belum dapat dibuktikan
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: Data dukung yang dilampirkan belum dapat menjawab rencana aksi sepenuhnya atas kegiatan Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK karena hanya menunjukkan adanya kegiatan <i>entry meeting</i> pemeriksaan BPK RI
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Belum terdapat data dukung terkait Pemeliharaan Mesin Cacah; 2. Belum terdapat data dukung terkait Sewa Ruang Arsip Tiga; 3. Belum terdapat data dukung terkait Penataan Arsip Barang/Jasa
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: Data dukung yang dilampirkan belum dapat menjawab rencana aksi sepenuhnya karena belum terdapat data dukung terkait adanya forum koordinasi konsultasi dengan mitra
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung yang dilampirkan masih dalam bentuk draft Excel, belum ditandatangani dan terdapat indikator <i>output</i> yang data dukungnya belum dilampirkan, dengan catatan: 1. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Pemutakhiraan RPD", data dukung yang dilampirkan berupa draft RPD Triwulan I dalam bentuk Excel dan belum ditandatangani;

		<p>2. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Penyerapan Anggaran", data dukung yang dilampirkan berupa file dokumen indikator penyerapan dan belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</p> <p>3. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Penyelesaian Tagihan", data dukung yang dilampirkan berupa file dokumen data indikator penyelesaian tagihan, belum tergambar dalam bentuk laporan yang ditandatangani;</p> <p>4. Pada indikator <i>output</i> "Tersedianya Laporan Capaian Output", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi</p>
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	<p>Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung yang belum dilampirkan, dengan catatan:</p> <p>1. Pada indikator <i>output</i> "Laporan RKBMN T+2", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi;</p> <p>2. Pada indikator <i>output</i> "Laporan Pengawasan dan Pengendalian", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi;</p> <p>3. Pada indikator <i>output</i> "Kegiatan Bimtek/Workshop/Paket Meeting terkait pengelolaan BMN", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi</p>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	<p>Pelaksanaan kegiatan sebagian indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi karena terdapat data dukung yang belum dilampirkan, dengan catatan:</p> <p>1. Pada indikator <i>output</i> "Tersusunnya Laporan Keuangan dengan tepat waktu" rencana aksi "Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal", belum terlampir data dukungnya, sehingga belum menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi</p>
16.	Indeks Sistem Merit	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I

17.	Pelaksanaan Core Value ASN: Indeks BerAKHLAK	Tidak terdapat pelaksanaan aksi yang dilaksanakan pada Triwulan I
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Telah terdapat penjelasan pelaksanaan aksi di Triwulan I dalam Laporan Progress SKM Triwulan I, namun terkait dengan target indikator <i>output</i> "Terbentuknya Tim Evaluasi Pedoman Penyelenggaran Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI sesuai Peraturan Kementerian PANRB Nomor 14 Tahun 2017" belum sesuai, karena di Laporan Progress yang dilampirkan merupakan Surat Tugas tahun 2024 dan tidak dilampirkannya eviden Surat Tugas tahun 2025 di folder eviden Triwulan I
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Belum terdapat data dukung yang menggambarkan Penentuan ULE dan penyesuaian jadwal pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional; Belum terdapat data dukung terkait Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator Mandiri Instansional; Belum terdapat data dukung terkait progress pengembangan aplikasi Mal Pelayanan Publik Online (<i>One Stop Information Service</i>)
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Rencana aksi "Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI" dan rencana aksi "Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027" menggunakan pelaksanaan rapat reviu RITIK oleh Kementerian PANRB dan pakar pada tanggal 25 Februari 2025 di Sheraton Grand Jakarta. Namun, belum menggambarkan bagaimana penyusunan kebijakan internal arsitektur SPBE DPR RI dan Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027;

		<p>2. Rencana aksi “Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi” menggunakan rapat koordinasi terkait domain kualitas data dan evaluasi SOP Kualitas Penjaminan Data bersama BPS tanggal 10 Maret 2025. Namun, belum tergambar Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi yang dimaksud;</p> <p>3. Belum diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I</p>
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Pelaksanaan kegiatan seluruh indikator <i>output</i> aksi yang ditargetkan pada Triwulan I telah menggambarkan kualitas pelaksanaan aksi

F. REKOMENDASI EVALUASI RB ON-GOING GENERAL TRIWULAN I

NO	AKSI	CATATAN
1.	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	<p>1. Agar dilampirkan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Laporan Evaluasi Kelembagaan di Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah dilakukan; b. Undangan Sekretaris Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Nomor: B/4/KT.02/2024 tanggal 14 Januari 2024, perihal: Undangan Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi. <p>2. Agar disesuaikan kembali rencana aksi yang disusun dengan menyesuaikan penggunaan anggaran di Triwulan I sebesar Rp. 28.710.000 atau 33,95% (detail indikator yang menggunakan anggaran)</p>
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN: Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN	-
3.	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional: Indeks SPBE	<p>1. Rencana aksi Indeks SPBE untuk setiap rencana satuan <i>output</i> untuk dapat disesuaikan. Jika terdapat beberapa eviden, bisa ditulis dengan “dokumen”;</p> <p>2. Agar diberikan penjelasan terkait penggunaan anggaran terutama penggunaan anggaran yang digunakan pada Triwulan I, terkait</p>

		<p>dengan pelaksanaan kegiatan Rapat Penyusunan Rencana Kerja SPBE tanggal 19 Februari 2025 di Hotel Artotel Mangkuluhur;</p> <p>3. Terkait kualitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Agar melengkapi matriks/kertas kerja rencana aksi yang menjelaskan pelaksanaan (progress) peta proses bisnis berbasis BPMN; b. Agar melengkapi penerapan audit TIK dan audit keamanan eksternal atau ditindak lanjut dari audit TIK sebelumnya
4.	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Terintegrasi: Nilai SAKIP	-
5.	Pembangunan Zona Integritas di Unit Kerja: Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	-
6.	Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah: Tingkat Maturitas SPIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar merevisi rencana aksi “Penyesuaian dokumen perencanaan kinerja dengan penetapan target yang telah disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dalam mencapai sasaran” dengan target indikator “Laporan Reviu Perubahan Indikator dan Target Kinerja PK”; 2. Agar menyesuaikan rencana aksi pada pelaksanaan kegiatan “Evaluasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal DPR RI Tahun 2025” ditandatangani pada 16 April 2025, sehingga tidak tepat waktu atau setelah Triwulan I. Jika menyesuaikan, maka dapat direvisi rencana aksi (geser ke Triwulan II atau ditambah ke Triwulan III); 3. Terkait dengan kualitas, kegiatan evaluasi Perjanjian Kinerja belum dapat menggambarkan hasil “Penyesuaian Dokumen Perjanjian Kinerja dengan penetapan target yang disesuaikan dengan capaian sebelumnya” dan “Memperbaiki indikator sasaran yang masih belum relevan dengan mencapai sasaran”. Sehingga, diharapkan dapat melakukan koordinasi secara intensif dengan Biro Perencanaan (cq. Bagian PKORB) terkait perubahan Perjanjian Kinerja pada Eselon I dan II di Sekretariat

		<p>Jenderal DPR RI (dapat melampirkan Laporan Singkat Koordinasi Evaluasi Perjanjian Kinerja dengan Bagian PKORB, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disesuaikan;</p> <p>4. Rencana aksi “Mengimplementasikan proses manajemen risiko yang terdiri atas identifikasi, analisis, evaluasi, dan monitoring sampai ke tingkat Sekretaris Jenderal DPR RI” dengan target indikator “<i>Risk Register</i>, Laporan Evaluasi <i>Risk Register</i>, dan Laporan Monitoring Penanganan Risiko”. Namun, <i>output</i> yang diberikan belum dapat menggambarkan pelaksanaan evaluasi <i>risk register</i> di Sekretaris Jenderal DPR RI karena evaluasi yang dilaksanakan baru dilaksanakan di Deputi Persidangan, Badan Kelembagaan dan jajaran di bawahnya. Kemudian, belum diberikan penjelasan mengenai <i>risk residual</i> yang terdapat di Sekretaris Jenderal DPR RI. Serta <i>Risk Register</i> Tahun 2025 yang dilampirkan masih dalam bentuk Excel (belum formal/tanda tangan oleh pimpinan unit kerja). Sehingga, perlu untuk diberikan penjelasan di Laporan Progress terkait hal di atas;</p> <p>5. Agar diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I di Laporan Progres</p>
7.	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat: Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	<p>1. Untuk rencana aksi “FGD Optimalisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat”, dengan realisasi <i>output</i> berupa “Diskusi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Aplikasi SP4N LAPOR” dilaksanakan tanggal 14 Februari 2025: Apakah kegiatan tersebut hal yang sama, karena judul berbeda dan tidak dilampirkan Laporan Singkat yang menjelaskan terlaksananya tindak lanjut pengaduan Masyarakat;</p> <p>2. Agar Laporan Progress diberikan penjelasan (narasi) dari anggaran yang digunakan pada Triwulan I;</p> <p>3. Agar menambahkan penjelasan narasi tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan (agar dilampirkan dalam bentuk matriks/rencana aksi tindak lanjut), serta belum adanya laporan singkat kegiatan tersebut sehingga belum terlihat alur dari</p>

		<p>tindak lanjut pengaduan masyarakatnya seperti apa;</p> <p>4. Seluruh eviden belum dilampirkan di folder eviden, hanya ditampilkan pada laporan progress</p>
8.	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi: Survei Penilaian Integritas (SPI)	<p>1. Agar melampirkan data dukung atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi triwulan untuk Pembangunan ZI Tahun 2025;</p> <p>2. Agar melampirkan data dukung berupa matriks rencana aksi SPI KPK, disertai informasi mengenai progress pelaksanaannya, termasuk identifikasi rencana aksi yang telah maupun yang belum dilaksanakan</p>
9.	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Agar melampirkan Dokumen Prosiding Webinar Urgensi dan Pokok-Pokok Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Prosiding FGD Evaluasi dan Penataan Undang-Undang di Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Sinergitas Sistem Pendidikan Nasional yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang untuk menunjukkan keabsahan dokumen
10.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Agar melampirkan data dukung berupa Laporan Hasil Monitoring/Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
11.	Pelaksanaan Arsip Digital: Kualitas Pengelolaan Arsip Digital/Tingkat Digitalisasi Arsip	<p>1. Agar melampirkan data dukung terkait Pemeliharaan Mesin Cacah;</p> <p>2. Agar melampirkan data dukung terkait Sewa Ruang Arsip Tiga;</p> <p>3. Agar melampirkan data dukung terkait Penataan Arsip Barang/Jasa</p>
12.	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa: Indeks Tata Kelola Pengadaan	Agar melampirkan data dukung berupa forum koordinasi konsultasi dengan mitra
13.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	<p>1. Agar melampirkan eviden Pemutakhiran RPD sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</p> <p>2. Agar melampirkan eviden Laporan Penyerapan Anggaran sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</p> <p>3. Agar melampirkan eviden Laporan Penyelesaian Tagihan sesuai dengan satuan <i>output</i> yang telah ditetapkan, yaitu dalam bentuk laporan dan ditandatangani;</p>

		4. Agar melampirkan eviden Laporan Capaian <i>Output</i> , ditandatangani dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Indeks Pengelolaan Aset	<p>1. Agar melampirkan eviden Laporan RKBMN T+2”, ditandatangani dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden;</p> <p>2. Agar melampirkan eviden Laporan Pengawasan dan Pengendalian, ditandatangani dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden;</p> <p>3. Agar melampirkan eviden Kegiatan Bimtek/ <i>Workshop/Paket Meeting</i> terkait pengelolaan BMN, paket <i>meeting</i> tanggal 13-14 Maret 2025, ditandatangani dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden</p>
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset: Opini BPK	Agar melampirkan eviden Laporan Keuangan dengan tepat waktu pada rencana aksi “Rekonsiliasi Laporan Keuangan Eksternal”, ditandatangani dan melakukan <i>upload</i> ke folder eviden
16.	Indeks Sistem Merit	-
17.	Pelaksanaan <i>Core Value</i> ASN: Indeks BerAKHLAK	-
18.	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral: Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-
19.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Survei Kepuasan Masyarakat	Agar mengupdate Surat Tugas/Surat Keputusan Tim Penyusun SKM Tahun 2025 di Laporan Progress dan dilampirkan dalam folder Eviden Triwulan I
20.	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima: Indeks Pelayanan Publik	<p>1. Memformalkan rencana aksi terbaru;</p> <p>2. Memformalkan Laporan Progres Rencana Aksi Triwulan III dan IV</p>
21.	Tingkat Implementasi Arsitektur SPBE	<p>1. Agar menyelaraskan satuan <i>output</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana Aksi “Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI”, ditulis <i>output</i> satuan “Surat Keputusan”, namun realisasi yang dilampirkan berupa “Laporan Singkat Rapat Reviu RITIK oleh Kementerian PANRB dan Pakar pada 25 Februari 2025 di Sheraton Grand Jakarta” agar disesuaikan menjadi “dokumen”; b. Rencana aksi “Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi” ditulis <i>output</i> satuan “Surat

		<p>Keputusan”, namun realisasi yang dilampirkan berupa “Laporan Singkat Rapat Koordinasi terkait Domain Kualitas Data dan Evaluasi SOP Penjaminan Kualitas Data Bersama BPS” agar disesuaikan menjadi dokumen;</p> <p>2. Agar memberikan penjelasan kualitas pada rencana aksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rencana aksi “Menyusun Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI” dan rencana aksi “Penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027” menggunakan pelaksanaan rapat reviu RITIK oleh Kementerian PANRB dan Pakar pada 25 Februari 2025 di Sheraton Grand Jakarta. Perlu menggambarkan bagaimana Penyusunan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE DPR RI dan penyempurnaan Arsitektur SPBE To-Be sesuai RITIK 2025-2027; b. Rencana aksi Penguatan Tata Kelola Arsitektur SPBE Domain Data dan Informasi menggunakan rapat koordinasi terkait domain kualitas data dan evaluasi SOP penjaminan kualitas data bersama BPS tanggal 10 Maret 2025 perlu menggambarkan tata kelola arsitektur SPBE domain data dan informasi yang dimaksud. <p>3. Agar diberikan penjelasan penggunaan anggaran pada Triwulan I</p>
22.	Indeks Perencanaan Pembangunan	<p>1. Agar melampirkan data dukung terkait penentuan ULE dan penyusunan jadwal pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional;</p> <p>2. Agar melampirkan data dukung terkait Pembentukan Tim Pendampingan ULE dan Evaluator Mandiri Instansional;</p> <p>3. Agar melampirkan data dukung terkait progress pengembangan aplikasi Mal Pelayanan Publik Online (<i>One Stop Information Service</i>)</p>

G. KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (*OUTPUT DAN WAKTU*), KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI, KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB TEMATIK

NO	AKSI	KETERCAPAIAN TARGET-TARGET RENCANA AKSI (<i>OUTPUT DAN WAKTU</i>)	KUALITAS KEGIATAN TERHADAP EKSPEKTASI RENCANA AKSI RB TEMATIK	KUALITAS MANAJEMEN DALAM PELAKSANAAN RB TEMATIK
1.	Pengentasan Kemiskinan	Pelaksanaan aksi atas sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum dapat memenuhi target <i>output</i> sesuai indikator yang ditetapkan. Sebagian pelaksanaan aksi belum tepat waktu karena data dukung yang disampaikan belum sesuai dengan indikator <i>output</i> yang ditargetkan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Data dukung belum dapat menjawab rencana aksi karena belum terdapat SK Tim Penyusun NA RUU Pangan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Data dukung belum dapat menjawab rencana aksi karena belum terdapat SK Tim Penyusun NA RUU Pangan
2.	Realisasi Investasi	Pelaksanaan aksi atas sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum dapat memenuhi target <i>output</i> sesuai indikator yang ditetapkan. Sebagian pelaksanaan aksi belum tepat waktu karena data dukung yang disampaikan belum sesuai dengan indikator <i>output</i> yang ditargetkan	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: 1. Data dukung belum dapat menjawab rencana aksi karena belum terdapat SK Tim Penyusun NA untuk indikator terkait	Sebagian indikator yang ditargetkan pada Triwulan I belum didukung dengan eviden yang berkualitas dengan catatan sebagai berikut: Data dukung belum dapat menjawab rencana aksi karena belum terdapat SK Tim Penyusun NA untuk indikator terkait

3.	Digitalisasi Pemerintahan	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai dengan hasil yang memenuhi target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai dengan hasil yang signifikan dan memenuhi target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang melebihi target	Manajemen berhasil memastikan belanja produk dalam negeri melebihi target, mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan yang efektif
5.	Pengendalian Inflasi	Target <i>output</i> dan waktu pelaksanaan tercapai dengan hasil yang memenuhi target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target	Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya sesuai ekspektasi rencana aksi RB dengan hasil yang sesuai target

H. REKOMENDASI EVALUSAI RB ON-GOING TEMATIK TRWIULAN I

NO	AKSI	REKOMENDASI
1.	Pengentasan Kemiskinan	Agar melampirkan data dukung terkait Pembentukan Tim melalui SK Tim Penyusun NA RUU Pangan
2.	Realisasi Investasi	Agar melampirkan data dukung terkait Pembentukan Tim melalui SK Tim Penyusun NA
3.	Digitalisasi Pemerintahan	-
4.	Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN)	-
5.	Pengendalian Inflasi	-